

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
KOPERASI BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT
DAN SK MENKOP NO. 194/KEP/M/IX/1998
Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**A. Prasasti Desi SW.
NIM : 002114163**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
KOPERASI BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT
DAN SK MENKOP NO. 194/KEP/M/IX/1998
Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**A. Prasasti Desi SW.
NIM : 002114163**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT DAN SK MENKOP
NO. 194/KEP/M/IX/1998
(STUDI KASUS PADA KOPERASI KREDIT BINA WARGA DI
SURAKARTA)**

Oleh :

NAMA : A. PRASASTI DESI SW.

NIM : 002114163



Telah Disetujui oleh :

Pembimbing I :

Tanggal : 3 Mei 2007

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Trisnawati Rahayu'.

M. TRISNAWATI RAHAYU, SE, M.Si, Akt

Pembimbing II :

Tanggal : 3 Agustus 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hansyadi Yuli Hartanto'.

Ir. Drs. HANSIADI YULI HARTANTO, M.Si, Akt.

SKRIPSI

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT
DAN SK MENKOP NO. 194/KEP/M/IX/1998
Studi Kasus pada Koperasi Kredit Bina Warga Di Surakarta**

Dipersiapkan dan Ditulis Oleh :
A. PRASASTI DESI SW.
NIM : 002114163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji:


	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E, M.Si, Akt.
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, S.E, M.Si, Akt.
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si, Akt.
Anggota	Drs. Yosef Widya K., M.Si, Akt

Ttd



Yogyakarta, 31 Agustus 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan.




Dr. Alex Kahu Lantum, M.S.

Guru yang terbaik adalah pengalaman, dan pengalaman hidup telah mengajarku banyak hal. Terimakasih guru.

Kupersembahkan untuk :
Suamiku Adi Satya Muryana Sumargo,ST
Anakku tersayang Angela Masayu Putri Satya
Serta keluarga, saudara dan temanku



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT DAN SK MENKOP NO.
194/KEP/M/IX/1998

Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 18 Agustus 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kescluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2007
Yang membuat pernyataan,

A. Prasasti Desi SW
NIM : 002114163

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat, bimbingan, dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Penelitian ini penulis beri judul “PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT DAN SK MENKOP No. 194/KEP/M/IX/1998“. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun demikian penulis juga menyadari adanya keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan yang lebih baik pada skripsi ini. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Dr. Paulus Suparno S.J., selaku Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Latum, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Y.H. M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Ibu M. Trisnawati Rahayu, SE. M.Si., Akt, selaku Dosen MPT dan Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak E. Maryarsanto P., SE.,Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma terimakasih banyak karena sudah membimbing dan mendidik penulis selama menempuh kuliah di Universitas Sanata Dharma.
7. Bapak Drs. AJ. Ratno Widodo yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data-data dalam penelitian di Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta.
8. Suamiku tercinta Alb. Adi Satya MS, ST yang telah membantu, serta memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian yang menjadi harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 31 Agustus 2007

A. Prasasti Desi SW

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pengertian Koperasi	8
B. Jenis-jenis Koperasi	10
C. Koperasi Kredit	14

D. Pengertian Laporan Keuangan	15
E. Elemen Laporan Keuangan Koperasi.....	16
F. Pengertian Analisis Laporan Keuangan	26
G. Tujuan Analisis Laporan Keuangan.....	27
H. Arti Penting Penilaian Kinerja	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	32
C. Subyek Dan Obyek Penelitian	32
D. Data Yang Diperlukan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Perbandingan Antara Kriteria Keuangan Menurut Induk Koperasi Kredit Indonesia Dengan Kriteria Kinerja Keuanga Menurut Keputusan Mentri Koperasi.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM KOPERASI.....	50
A. Latar Belakang Timbulnya Gerakan Koperasi Kredit di Indonesia.....	50
B. Koperasi Kredit Bina Warga.....	52
C. Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi	58
D. Struktur Organisasi Koperasi Kredit Bina Warga.....	59
E. Daerah Kerja Koperasi Kredit Bina Warga	61
F. Permodalan Koperasi	61

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	64
A. Laporan Keuangan Koperasi Kredit Bina Warga	64
B. Penilaian Kesehatan Koperasi Kredit Menurut Inkopdit.....	69
C. Penilaian Kesehatan Koperasi Kredit Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 194/KEP/M/IX/1998	81
D. Perbandingan Antara Kriteria Kinerja Keuangan Menurut Induk Koperasi Kredit Indonesia dengan Kriteria Kinerja Keuangan Menurut Keputusan Menteri Koperasi	95
BAB VI PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bentuk Laporan Keuangan Neraca Koperasi	24
Tabel 2	Bentuk Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi.....	25
Tabel 3	Predikat Kesehatan Koperasi Menurut Inkopdit.....	40
Tabel 4	Lembar Kerja Penilaian Kesehatan Menurut Keputusan Menteri Koperasi No. 194/KEP/M/IX/1998	41
Tabel 5	Predikat Kesehatan Koperasi Menurut Keputusan Menteri Koperasi No 194/KEP/M/IX/1998	49
Tabel 6	Neraca Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004	65
Tabel 7	Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004	66
Tabel 8	Perhitungan Modal Produktif Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004	68
Tabel 9	Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004	68
Tabel 10	Rasio Modal Produktif Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004....	69
Tabel 11	Rasio Efisiensi Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004.....	70
Tabel 12	Rasio Kelalaian Pinjaman Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004	71
Tabel 13	Rasio Pinjaman Terhadap Modal Produktif Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004	72

Tabel 14 Rasio Distribusi Pinjaman Menurut Kriteria Inkopdit	
Tahun 2002-2004	73
Tabel 15 Rasio Rentabilitas Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004	74
Tabel 16 Rasio Solvabilitas Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004	75
Tabel 17 Rasio Ketangguhan Dana Cadangan Menurut Kriteria Inkopdit	
Tahun 2002-2004	76
Tabel 18 Rasio Perputaran Modal Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004..	76
Tabel 19 Rasio Bunga Atas Simpanan Menurut Kriteria Inkopdit	
Tahun 2002-2004	77
Tabel 20 Rasio Pertumbuhan Nominal Menurut Kriteria Inkopdit	
Tahun 2002-2004	79
Tabel 21 Nilai Predikat Kesehatan Koperasi Kredit Menurut Inkopdit	80
Tabel 22 Hasil Perhitungan Rasio Menurut Kriteria Inkopdit	
Tahun 2002 – 2004.....	80
Tabel 23 Rasio Rata-Rata Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002 – 2004	81
Tabel 24 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset Menurut Kriteria SK	
Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	82
Tabel 25 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	
Menurut Kriteria SK Menkop No.194/KEP/M/IX/1998	
Tahun 2002-2004	83
Tabel 26 Rasio Antara Volume Pinjaman Kepada Anggota Terhadap Volume	
Pinjaman yang Diberikan Menurut Kriteria SK Menkop	
No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	84

Tabel 27 Rasio Antara Risiko Pinjaman Bermasalah Dengan Pinjaman yang Diberikan Menurut Kriteria SK Menkop NO. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	86
Tabel 28 Rasio Antara Cadangan Berisiko dengan Resiko Pinjaman Bermasalah Menurut Kriteria SK Menkop NO. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	87
Tabel 29 Rasio Manajemen Menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	88
Tabel 30 Rasio Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	90
Tabel 31 Rasio Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak Terhadap Total Asset Menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	91
Tabel 32 Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional menurut Kriteria SK Menkop NO. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004.....	92
Tabel 33 Rasio Likuiditas menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004	93
Tabel 34 Nilai Predikat Kesehatan Koperasi Menurut Keputusan Menteri Koperasi No 194/KEP/M/IX/1998.....	94
Tabel 35 Jumlah Skor Penilaian Kesehatan Tahun 2002-2004.....	94
Tabel 36 Perbandingan Kriteria Inkopdit dan Kriteria KEPMENKOP No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002 – 2004.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Data Statistik Koperasi Kredit Bina Warga	103
Data Tambahan Koperasi Kredit Bina Warga	104
Struktur Organisasi Koperasi Kredit Bina Warga	105
Pedoman Teknik Pengumpulan Data.....	106
Kuesioner Aspek Manajemen menurut keputusan menteri Koperasi No. 194/KEP/M/IX/1998	107

ABSTRAK

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT DAN SK MENKOP
NO. 194/KEP/M/IX/1998
Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Bina Warga Di Surakarta**

**A. PRASASTI DESI SW
NIM: 002114163
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007**

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang lengkap, dapat dipercaya, diandalkan, dan mudah dipahami, sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat bagi para pengambil keputusan. Koperasi juga memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dalam kurun waktu satu periode akuntansi.

Penelitian mengenai laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kesehatan koperasi ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap koperasi kredit yang bersangkutan, dan koperasi kredit yang lain. Ruang lingkup penelitian ini adalah Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta dengan sumber data sekunder baik kuantitatif maupun kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa laporan keuangan Koperasi Kredit Bina Warga selama tahun 2002-2004 menunjukkan hasil yang hampir sama yaitu cukup sehat, pada posisi 71,57%; 59,61%; 62,26% menurut Induk Koperasi Kredit dan 83,57%; 79,51%; 79,74% menurut Kepmen No. 194/KEP/M/IX/1998.

Adapun saran bagi koperasi yang bersangkutan yaitu, sebaiknya Koperasi Kredit Bina Warga meningkatkan modal produktifnya dengan jalan mencari pinjaman kepada Silang Pinjam Daerah (SPD) seperti BK3D atau dengan cara memupuk modal dari anggota maupun masyarakat umum, dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk menabung di koperasi. Koperasi juga harus memperhatikan timbal baliknya yaitu memberikan bunga yang menarik lebih dari bunga pasar dan memberi pelayanan yang baik.

Karena tingkat kelalaian pinjaman cukup tinggi sehingga mengakibatkan terhambatnya perputaran modal, sebaiknya koperasi dapat menekan kelalaian pinjaman dengan cara lebih selektif dalam pencairan dana pinjaman. Selain itu sebaiknya pinjaman dalam jumlah yang besar agar menggunakan agunan dan jasa notaris untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

ABSTRACT

**AN ASSESSMENT OF THE COOPERATION'S FINANCIAL HEALTH
LEVEL BASED ON CREDIT COOPERATION PARENT AND
COOPERATION MINISTRY DECREE NO. 194/KEP/M/IX/1998
A Case Study at Bina Warga Credit Cooperation in Surakarta**

**A.PRASASTI DESI SW
NIM : 002114163
Sanata Darma University
Yogyakarta
2007**

Financial statement aims to provide complete, reliable, believable, and comprehensible information, so that it will results in a proper decision for the decision makers. Cooperation also needs financial statement for assessing the financial performance in one accounting period.

A study on financial statement as a tool of assessing the cooperation's health is expected to be able to give input into the concerned credit cooperation, and other credit cooperation. The scope of this research was Bina Warga Credit Cooperation in Surakarta with secondary data sources, both quantitative and qualitative.

The conclusion of this research was that financial statement of Bina Warga Credit Cooperation during 2002-2004 period showed the similar result, namely healthy enough, at the position 71.5%;59.61%;62.26% according to Credit Cooperation Parent and 83.57%;79.51%; 79.74% according to the Ministry Decree No. 194/KEP/M/IX/1998.

The suggestion for the related cooperation was that Bina WargaCredit Cooperation should increase its productive asset by looking for loan from the Local Lend Cross (SPD) such as BK3D or by growing the capital from the member or public society, by giving illumination about saving in the cooperation to the society. Cooperation should also consider the exchange by giving more appealing interest than the market interest and by providing a good service.

Because the level of loan negligence was sufficiently high so that it resulted in the obstruction of capital circulation, the cooperation should suppress the level of loan negligence by more selectively way in the loan fund clearing. In addition, the large amount of loan should use guarantee and notary service for anticipating unexpected things.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi di berbagai negara, seperti halnya di Indonesia, telah diterima dan digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam mencapai tujuan ekonomi. Hal ini pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan di mana hal ini termasuk ruang lingkup ekonomi (Wirasmita, 1999:1).

Pembangunan ekonomi di Indonesia, mengacu pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan, oleh sebab itu kemakmuran disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu wadah dan wahana yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian terutama dalam usaha meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Koperasi juga merupakan badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi, menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri (para anggotanya)

dari kesulitan-kesulitan yang pada umumnya diderita mereka (Swasono, 1995:12)

Koperasi merupakan salah satu sektor dalam perekonomian nasional disamping sektor pemerintah (BUMN) dan swasta, yang diharapkan mampu memberikan andil yang cukup berarti, sehingga pada akhirnya mampu menjadi soko guru perekonomian nasional. Tindakan pemerintah tersebut dimaksudkan agar koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan khususnya para anggota yang berkembang secara luas dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Manajemen koperasi yang terbuka lebih ditekankan pada pelaksanaannya dengan melalui pertanggungjawaban kepengurusan koperasi.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memfokuskan kegiatan usahanya hanya pada usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota, untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lain.

Koperasi kredit sebagai badan usaha bersama dalam bidang keuangan, dalam pengelolaannya harus menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan konsep dan prinsip akuntansi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar usaha koperasi bisa mendatangkan keuntungan ialah adanya sistem pencatatan yang baik dan teratur, yang juga dapat difahami oleh para anggota dan pihak ekstern yang berkepentingan. Sama seperti semua badan usaha lainnya, koperasi pun harus menyelenggarakan pembukuan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada setiap akhir periode pembukuan harus dibuat laporan keuangan yang berupa perhitungan neraca akhir dan perhitungan rugi/laba yang harus dilaporkan dalam rapat anggota.

Pemahaman mengenai laporan keuangan ini sangat penting sebab salah pengertian terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan yang salah pula serta dapat membawa koperasi menuju kehancuran. Di dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi, serta prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, penggunaan sumber dana yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami sehingga menghasilkan keputusan yang berharga, yang dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi, serta dapat digunakan untuk menilai kesehatan suatu koperasi. Pertumbuhan koperasi yang begitu cepat dapat dilihat dari kelayakan ekonomi usahanya, sehingga sebuah koperasi dapat dikatakan sehat usahanya.

Untuk memastikan pertumbuhan koperasi sehingga dapat dikatakan sehat, dapat dikaji melalui analisis standar rasio berdasarkan data–data yang disajikan dalam laporan keuangan terutama di dalam neraca. Standar rasio yang dimaksud adalah angka-angka dalam analisis laporan keuangan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dari pos-pos

yang dianalisa pada laporan keuangan. Rasio tersebut berbentuk angka-angka matematis yang sederhana, baik berupa angka biasa maupun prosentase (Wirasmita, 1999:38). Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian pada Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta dengan judul “PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN INDUK KOPERASI KREDIT DAN SK MENKOP NO. 194/KEP/M/IX/1998”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan keuangan koperasi kredit Bina Warga menurut kriteria Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) ?
2. Bagaimanakah tingkat kesehatan keuangan koperasi kredit Bina Warga menurut kriteria Surat Keputusan Menteri Koperasi Kredit No. 194/KEP/M/IX/1998 ?
3. Bagaimanakah perbandingan antara tingkat kesehatan keuangan koperasi kredit Bina Warga menurut kriteria Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dan menurut kriteria Surat Keputusan Menteri Koperasi Kredit No. 194/KEP/M/IX/1998 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui metode penilaian dan tingkat kesehatan keuangan koperasi kredit Bina Warga menurut Induk Koperasi Kredit (Inkopdit).

2. Untuk mengetahui metode penilaian dan tingkat kesehatan keuangan koperasi kredit Bina Warga menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi No. 194/KEP/M/IX/1998.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara metode penilaian dan tingkat kesehatan keuangan koperasi kredit Bina Warga menurut Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dan menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi Kredit No. 194/KEP/M/IX/1998.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Koperasi

Penelitian mengenai laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kesehatan koperasi diharapkan dapat memberikan masukan terhadap koperasi kredit Bina Warga dan koperasi lain dimasa yang akan datang.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan dan bacaan mengenai laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kesehatan koperasi kredit.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai sumber data atau informasi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sejenis.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan prakteknya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membaginya kedalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian teoritis dari hasil studi pustaka yang dijadikan sebagai dasar mengolah data yang didapat dari koperasi simpan pinjam.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan perbedaan kinerja keuangan.

BAB IV : Gambaran Umum Koperasi

Bab ini berisi mengenai sejarah latar belakang berdirinya koperasi, tujuan, fungsi serta peran koperasi Kredit Bina Warga, alat perlengkapan organisasi koperasi, struktur organisasi koperasi, daerah kerja koperasi, dan yang terakhir sumber modal koperasi kredit.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai analisis aspek penilaian kesehatan keuangan koperasi menurut kriteria Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dan Surat Keputusan Menteri Koperasi Kredit No. 194/KEP/M/IX/1998.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan terhadap koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan “Co” dan “Operation” yang jika digabungkan kedua perkataan tersebut mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi ekonomi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang (*people based association*), untuk membedakan bangunan usaha kapitalistik yang merupakan perkumpulan modal (*capital based association*) seperti halnya pada perseroan terbatas, persero atau sejenisnya.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, mendefinisikan Koperasi sebagai:

“Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Undang-undang No. 12 Tahun 1967 merupakan pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian, yang mana Undang-undang tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat untuk mengesahkan kembali koperasi pada posisi dan peran seharusnya sebagai badan usaha dan wadah perjuangan ekonomi rakyat seperti diamanatkan UUD 1945.

Pembangunan koperasi yang telah dilaksanakan oleh gerakan koperasi bersama-sama pemerintah sebagai perwujudan Undang-undang No. 12 Tahun 1967, telah mencapai hasil yang baik dibandingkan dengan

pembangunan sebelumnya. Namun untuk kurun waktu decade terakhir (1980-1990), perkembangan koperasi di Indonesia mengalami banyak sekali pertumbuhan dan ini tidak lepas dari adanya globalisasi perekonomian dunia. Ini berarti koperasi sebagai pelaku ekonomi harus dapat mengantisipasi kondisi dan situasi tersebut agar koperasi dapat berkembang menjadi badan usaha yang mempunyai daya hidup yang teguh dan mandiri.

Oleh karena itu pemerintah membuat adanya Undang-undang tentang perkoperasian yang baru, dikarenakan Undang-undang No. 12 Tahun 1967 kurang memadai lagi, dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang berlangsung sekarang ini maupun masa yang akan datang, maka pada tanggal 21 Oktober 1992 dikeluarkan Undang-undang RI No. 25 yang merupakan landasan hukum baru yang diharapkan mampu mendorong koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan mandiri.

Sesuai Bab I, pasal 1, butir ke-1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Konsep koperasi undang-undang No. 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha. Hal ini sangat penting dan mendasar karena mengandung makna, koperasi adalah organisasi ekonomi yang harus dikelola secara professional dengan mengindahkan kaidah-kaidah ekonomi koperasi.

Jika kita lihat sekilas definisi kedua undang-undang tersebut hampir sama, hanya saja dalam undang-undang terbaru ini prinsip koperasi dinyatakan secara tersurat. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam undang-undang perkoperasian yang baru adalah:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Koperasi sebagai badan usaha diharapkan peranannya sejajar dengan badan usaha lainnya dalam Perekonomian Nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipasif, dan berwatak sosial.

B. Jenis-jenis Koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang, namun kenyataannya yang terjadi di lapangan cukup beraneka ragam. Keragaman koperasi pada perkembangannya sekarang ini, sesungguhnya tidak dapat dibagi ke dalam jenis-jenis koperasi yang baku. Karena itu pembagian untuk menentukan jenis koperasi adalah pada kesamaan aktivitas, keperluan dan kebutuhan ekonomi anggotanya antara lain:

1. Jenis Koperasi Menurut Jenjang Hirarki Organisasi

Koperasi ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Koperasi Primer

Koperasi ini beranggotakan orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya.

b. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis, mereka bergabung untuk tujuan efisien dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani anggotanya. Jenjang penggabungan beberapa koperasi ini bertingkat-tingkat dan ada pula yang hanya satu tingkat saja. Semuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha serta pelayanan kepada para anggota.

2. Jenis Koperasi Menurut Status Hukum yang Dimiliki

Menurut status hukum yang dimilikinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua golongan. Pembagian ini sebenarnya hanya bersifat sementara, karena pada dasarnya setiap organisasi yang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi menurut undang-undang, berhak memperoleh badan hukum atau perlindungan lainnya. Jenis koperasi tersebut adalah:

a. Koperasi Berbadan Hukum (Koperasi Formal)

Adalah koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya.

b. Lembaga Kerjasama Ekonomi Masyarakat yang Belum atau Tidak Berbadan Hukum.

Yaitu kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesatuan kebutuhan atau kepentingan ekonomi diantara para anggotanya. Kelompok-kelompok atau lembaga seperti ini bekerja atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam AD (Anggaran Dasar) atau ART (Anggaran Rumah Tangga) yang tertulis, namun belum memiliki badan hukum.

3. Jenis Koperasi Menurut Sifat Kegiatan Usahanya.

Menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dibagi menjadi:

a. Koperasi Tunggal Usaha (*Single Purpose*)

Ialah koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun para anggota dan kesempatan untuk memperluas kegiatan usaha koperasi ada.

b. Koperasi Serba Usaha.

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi para anggotanya.

4. Jenis Koperasi Menurut Kebutuhan dan Efisiensi.

a. Koperasi Konsumsi.

Yaitu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari.

b. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif serta kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi.

Adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi, maupun orang-orang anggota koperasi.

d. Koperasi Jasa

Yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

e. Koperasi Unit Desa (KUD)

Yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang bertempat tinggal atau mengadakan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD.

C. Koperasi Kredit

Menurut pasal 44 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, bagi koperasi lain dan anggotanya. Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian.

Sesuai dengan pasal tersebut koperasi kredit didefinisikan sebagai:

“Sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga mencapai modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka dengan bunga yang ringan serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (BK3I, 1996:1).”

Sekumpulan orang berarti bahwa untuk mendirikan koperasi sekurang-kurangnya harus ada 20 orang yang menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1967, mereka nantinya akan menjadi para pemilik, pelaksana dan pengontrol pelaksanaan koperasi itu sendiri.

Sekumpulan orang yang bersatu tersebut diikat oleh adanya kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan bersama di dalam salah satu lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan perkumpulan. Sekumpulan orang tersebut setuju, tanpa ada paksaan untuk menabung, sehingga dapat menciptakan modal bersama-sama dan bukan dari luar anggota dan untuk dipinjamkan hanya kepada anggotanya saja dengan bunga pinjaman yang rendah dan lebih rendah dari suku bunga yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat setempat. Pinjaman yang

diberikan hanya untuk kepentingan usaha anggota yang dapat meningkatkan penghasilan dan stabilisasi kehidupan para anggota.

D. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari akuntansi, sedangkan akuntansi sendiri adalah suatu sistem informasi, yaitu data keuangan dari suatu bisnis, dicatat, dikumpulkan dan dikomunikasikan yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi adalah suatu bahasa bisnis (*language of business*), maka sebagai suatu bahasa akuntansi harus memiliki sifat yang komunikatif, agar dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakannya.

Definisi akuntansi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan di Amerika (AICPA) *American Institute of Certified Public Accounting* adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kualitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan (Baridwan, 1992:1).”

Pengertian tersebut mencakup tugas dari akuntansi dan mengelola data atas kegiatan suatu bisnis. Cara untuk mencatat, mengelompokkan serta menyimpulkan data bisa berbentuk suatu laporan keuangan yang dapat berguna bagi penggunanya. Kita tidak dapat membayangkan apabila laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi hanya berdasarkan pada selera setiap orang yang menyusunnya, pasti akan berbeda-beda dan kacau,

sehingga laporan keuangan tersebut tidak akan dapat dimengerti dan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang biasanya berupa neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan harga pokok penjualan. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan didalam koperasi analisis terhadap laporan rugi-laba akan memberikan gambaran tentang hasil dan perkembangan usaha koperasi .

“Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota (Tugiman, 1996:12).”

E. Elemen Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para anggota koperasi, selain itu laporan keuangan juga memenuhi tujuan lain sebagai laporan kepada pihak lain koperasi.

Laporan keuangan koperasi biasanya terdiri dari :

1. Neraca, menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha, menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha, serta beban-beban perkoperasian selama periode tertentu.
3. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir pada periode tertentu.
4. laporan Promosi Anggota, adalah laporan ekonomi yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi dalam kurun waktu tertentu.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:
 - a. Perlakuan Akuntansi, meliputi pengungkapan pendapatan, dan beban sehubungan dengan transaksi, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, dan dasar penetapan harga.
 - b. Pengungkapan akuntansi, meliputi aktiva yang dioperasikan, aktiva yang diperoleh secara hibah, pembagian SHU dan penggunaan cadangan, hak serta tanggungan modal penyertaan (Standar Akuntansi Keuangan, 1998:27).

Laporan tersebut di atas dikatakan sebagai laporan untuk tujuan umum. Sebagai tambahan dari laporan keuangan tersebut dapat ditambahkan atau dibuat laporan-laporan khusus yang menunjukkan bagian-bagian dari laporan keuangan dengan lebih rinci.

1. Susunan Laporan Keuangan Koperasi Kredit

Laporan keuangan koperasi kredit meliputi:

a. Neraca

Neraca menunjukkan jumlah harta yang dimiliki, yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan atau pasiva, dimana terdiri dari dua kewajiban, kewajiban kepada pihak luar disebut hutang dan kewajiban untuk pihak intern koperasi disebut modal.

1). Aktiva

Aktiva yaitu kekayaan, pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya yang dikuasai dan dioperasikan oleh badan usaha koperasi yang diperoleh dari kejadian masa lalu dan dapat memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, aktiva lancar adalah aktiva yang mudah diuangkan atau habis dalam satu daur proses operasional.

2). Kewajiban

Kewajiban yaitu utang pada pihak ketiga yang masih harus dipenuhi oleh koperasi. Kewajiban sebagai pengorbanan manfaat yang akan timbul dari transaksi masa lalu yang harus dipenuhi pada masa yang akan datang dengan mengurangi aktiva dan pendapatan. Kewajiban dibedakan menjadi dua golongan yaitu

hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan hutang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

3). Modal

Modal merupakan gambaran dari bagian kekayaan anggota koperasi atas kekayaan koperasi yang diukur dengan menghitung selisih antara aktiva dikurangi dengan hutang. Modal koperasi meliputi simpanan wajib, pinjaman-pinjaman dan penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.

b. Laporan Sisa hasil Usaha

Laporan Sisa Hasil Usaha menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.

1). Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk, kenaikan lain aktiva atau perolehan dari transaksi yang terjadi dalam usaha koperasi melalui penyerahan jasa kepada anggota selama satu periode.

2). Biaya

Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang selama satu periode.

3). Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan selisih pendapatan-pendapatan sesudah dikurangi biaya-biaya, bila pendapatan lebih kecil dari pada biaya disebut rugi.

c. Laporan Arus Kas

Aliran arus kas yang keluar dan kas yang masuk di cerminkan dalam laporan arus kas sebagai alat untuk menilai kemampuan badan usaha koperasi dalam menghasilkan kas dan menilai penggunaan kas tersebut. Kas biasanya terdiri dari saldo kas, rekening giro dan inventasi yang sangat likuid yang dengan mudah dapat diuangkan.

Laporan arus kas disusun menurut sumber dan penggunaan kas dari:

- 1). Aktiva operasi yaitu aliran sumber dan penggunaan kas sebagai usaha untuk meningkatkan aktivitas koperasi.
- 2). Aktivitas investasi adalah aliran sumber dan penggunaan kas yang berhubungan dengan investasi koperasi sebagai tujuan untuk memperoleh manfaat masa depan.
- 3). Aktivitas pendanaan adalah aliran sumber dan penggunaan kas yang dapat mengakibatkan perubahan jumlah modal/ekuitas dan pinjaman badan usaha koperasi.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi

Catatan atas laporan keuangan koperasi disusun untuk hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1). Kebijakan akuntansi yang penting sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
- 2). Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- 3). Informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan atas laporan keuangan.

e. Laporan Perubahan Kekayaan bersih

Laporan perubahan kekayaan bersih disajikan sebagai laporan keuangan tambahan yang terdiri dari:

- 1). Kekayaan bersih koperasi, yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan koperasi, dan SHU yang belum dibagi.
- 2). Simpanan pokok dan simpanan wajib yang disajikan dalam neraca sesuai dengan jumlah yang menjadi kewajiban untuk disetorkan.
- 3). Cadangan koperasi yang berasal dari pembagian SHU disajikan sebesar jumlah akumulasi pembagian SHU pada periode yang lalu dan menjadi hak milik koperasi.

2. Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan koperasi mempunyai karakteristik yang membedakan dengan laporan keuangan yang diterbitkan

perusahaan pada umumnya. Adapun karakteristik laporan keuangan koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya didalam rapat anggota tahunan.
 - b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan rugi-laba, laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komperatif.
 - c. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistim jaringan koperasi, maka beberapa akun atau istilah yang sama akan muncul, baik pada kelompok aktiva maupun kewajiban/kekayaan bersih.
 - d. Laporan rugi-laba menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha.
 - e. Dengan adanya konsep sistim jaringan koperasi dan peraturan pemerintah, maka terdapat aktiva (sumber daya) yang dimiliki koperasi tetapi tidak dikuasainya, dan sebaliknya terdapat aktiva (sumber daya) yang dikuasai koperasi namun tidak dimilikinya.
 - f. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi (Ikatan akuntan Indonesia, 1996:27.7).
3. Tujuan pelaporan Keuangan Koperasi.

Tujuan pelaporan keuangan koperasi secara umum adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi tersebut, baik pihak ekstern maupun pihak intern koperasi dan selanjutnya dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi.

Pihak intern menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan manajemen koperasi, sedangkan pihak ekstern menggunakan laporan keuangan untuk menentukan tujuan-tujuan seperti investasi (menjadi anggota koperasi), pemberian kredit, rekanan bisnis dan sebagainya.

Adapun tujuan laporan keuangan bagi pengguna informasi keuangan yang utama dan yang lainnya adalah:

- a. Dengan diterbitkan laporan keuangan koperasi, maka anggota koperasi dapat mengetahui manfaat yang didapat dengan menjadi anggota koperasi tersebut.
- b. Laporan keuangan dapat mencerminkan prestasi keuangan koperasi dalam suatu periode dengan mengukur manfaat kepada anggota dan besarnya SHU koperasi tersebut.
- c. Dengan memisahkan kekayaan dan kewajiban yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota dapat diketahui kekayaan/asset koperasi, kewajiban serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki koperasi.
- d. Untuk mengetahui peristiwa dan keadaan yang merubah sumber-sumber ekonomi koperasi dengan terlebih dahulu memisahkan peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
- e. Dapat mengetahui manfaat informasi keuangan lain yang berkaitan dengan likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Tabel 1 Bentuk Laporan Keuangan Neraca Koperasi

KOPERASI XYZ					
NERACA					
Per 31 Desember 200X dan 20X0					
Aktiva			Kewajiban Dan Kekayaan Bersih		
AKTIVA LANCAR	200X	20X0	KEWAJ. JK PENDEK	200X	20X0
Kas dan Bank	xxx	xxx	Hutang Usaha	xxx	xxx
Invest. Jk. Pendek	xxx	xxx	Hutang Pada Bank	xxx	xxx
Piutang Usaha	xxx	xxx	Hutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxx	xxx	Hutang Simpanan Anggota	xxx	xxx
Piutang Pinj. Non Anggota	xxx	xxx	Hutang Dana Bagian SHU	xxx	xxx
Penyisihan Piut. Tak Tagih	xxx	xxx	Hutang Jangka Panjang		
Piutang lain-lain	xxx	xxx	Akan Jatuh Tempo	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx	Biaya Harus Dibayar	xxx	xxx
Pendapatan akan diterima	xxx	xxx			
Jumlah Aktiva Lancar	Rpxxx	Rpxxx	Jumlah Kewaj. Jk Pendek	Rpxxx	Rpxxx
INVEST. JANGKA PANJANG			KEWAJ. JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada Kop.	xxx	xxx	Hutang Bank	xxx	xxx
Penyertaan pada Non-Kop.	xxx	xxx	Hutang Jk. Panj. Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Inves. Jk. Panj.	Rpxxx	Rpxxx	Jumlah Kewj. Jk. Panj.	Rpxxx	Rpxxx
AKTIVA TETAP			EKUITAS		
Tanah	xxx	xxx	Simpanan Wajib	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	Simpanan Pokok	xxx	xxx
Mesin-mesin	xxx	xxx	Modal Penyertaan		
Inventaris	xxx	xxx	Partisipasi Anggota	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx	Modal Penyertaan	xxx	xxx
Jumlah Aktiva Tetap	Rpxxx	Rpxxx	Modal Sumbangan	xxx	xxx
AKTIVA LAIN-LAIN			Cadangan	xxx	xxx
Ak. Tetap dalam Kontruksi	xxx	xxx	SHU Belum Dibagi	xxx	xxx
Beban Ditangguhkan	xxx	xxx	Jumlah Ekuitas	Rpxxx	Rpxxx
Jumlah Ak. Lain-lain	Rpxxx	Rpxxx			
JUMLAH AKTIVA	Rpxxx	Rpxxx	JUMLAH KEWAJ. DAN EKUITAS	Rpxxx	Rpxxx

(Standar Akuntansi Keuangan, 1998:27.10)

Tabel 2 Bentuk Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi

KOPERASI XYZ		
LAPORAN SISA HASIL USAHA		
Tahun yang berakhir 31 Desember 200X dan 20X0		
	200X	20X0
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota Beban Pokok	Rp xxx (xxx)	Rp xxx (xxx)
Partisipasi Netto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan Harga pokok	Rp xxx (xxx)	Rp xxx (xxx)
Laba (Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Sisa Hasil Usaha	Rp xxx	Rp xxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi Beban Perkoperasian	Rp xxx (xxx)	Rp xxx (xxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	xxx	xxx
Sisa Hasil Usaha Setelah Pos-pos Luar Biasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	xxx	xxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak Penghasilan	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha setelah Pajak	Rp xxx	Rp xxx

(Standar Akuntansi Keuangan, 1998:27.11)

F. Analisis Rasio

Dalam menentukan maupun memilih standar rasio, tergantung dan berdasarkan berbagai alternatif standar rasio. Angka-angka dalam standar rasio berbentuk angka-angka matematis yang sederhana, baik berupa angka biasa maupun prosentase. Sedangkan untuk jenis atau macam rasio analisis yang umum dipakai antara lain:

1. Rasio Likuiditas atau Modal Kerja

Mengukur kemampuan suatu perusahaan atau koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan atau koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

2. Rasio Leverage (*solvabilitas*)

Mengukur kemampuan perusahaan atau koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan atau koperasi tersebut dilikuidasi.

3. Rasio Aktivitas

Mengukur kemampuan perusahaan atau koperasi untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan atau koperasi untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan atau koperasi untuk membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham, tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

4. Rasio Profitabilitas (Keuntungan)

Mengukur kemampuan perusahaan atau koperasi untuk menghasilkan laba sampai pada periode tertentu diukur dengan kesuksesan perusahaan atau koperasi dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal (Wirasmita, 1999:38; Munawir, 2001:31).

G. Tujuan Kualitatif Laporan Keuangan

Tujuan utama akuntansi adalah menyusun laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya, untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi keuangan secara kualitatif guna pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan kekayaan bersih.
3. Menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam menafsirkan kemampuan memperoleh laba.
4. Menyajikan informasi lain yang diperlukan, mengenai perubahan harta dan kewajiban dan mengungkapkan informasi keuangan lain sesuai dengan keinginan pemakai.

Laporan keuangan selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut juga harus mempunyai kualitas tertentu, sebab laporan keuangan lebih bermanfaat

jika dapat memenuhi kualitas. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) membahas masalah tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, yang menguraikannya menjadi empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat Dipahami

Informasi yang berkualitas dengan mudah dapat dipahami oleh para pemakainya, dengan asumsi bahwa para pemakainya mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai laporan keuangan atau aktivitas ekonomi dan bisnis serta istilah-istilah yang terdapat pada laporan keuangan.

2. Relevan

Relevansi suatu laporan keuangan harus dihubungkan dengan maksud dan tujuan. Bila laporan keuangan tidak relevan dengan penggunaannya maka laporan keuangan tersebut tidak ada gunanya meskipun kualitas laporan keuangan tersebut baik.

3. Daya Uji

Laporan keuangan dapat ditingkatkan manfaatnya apabila informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur keuangan independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

4. Daya Banding

Laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan perusahaan yang lain pada periode yang sama. Adanya macam-macam

perbedaan metode praktek akuntansi, menyulitkan daya banding antar perusahaan maka penekanannya pada tercapainya daya banding pada periode yang sama dan menganut metode akuntansi yang sama.

H. Arti Penting Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja organisasi pada dasarnya merupakan usaha formal yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai suatu organisasi dalam mengelola sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi organisasi karena penilaian kinerja tersebut dipergunakan untuk :

- a. menilai keberhasilan organisasi dalam suatu periode tertentu
- b. memotivasi semua lini pekerja dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan
- c. menyusun sistem imbalan dalam organisasi
- d. memberikan pedoman bagi usaha perbaikan atau peningkatan kerja organisasi (Wirdayanto, 1993:19)

Dalam penilaian kinerja koperasi kredit ada berbagai macam cara atau alat sebagai tolak ukur untuk menilai, sehingga dapat memberikan gambaran dan lebih mudah di mengerti kinerjanya atau kondisi koperasi kredit tersebut pada suatu tahun atau periode tertentu. Alat sebagai tolak ukur itu bisa seperti yang sudah dibuat oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), SK Menkop

No 194/KEP/M/IX/1998, ada pula sistem penilaian internasional seperti CAMEL dan PEARLS.

Dalam penelitian ini, penulis memilih sistem dari Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dibandingkan dengan SK Menkop No 194/KEP/M/IX/1998.

Hanya sebagai pengetahuan, sistem PEARLS menyediakan sekumpulan rasio keuangan (44 rasio) untuk memonitor atau memantau stabilitas keuangan dan pertumbuhan potensial dari kredit union, CAMEL juga menyediakan sekumpulan rasio keuangan, tetapi sistem camel masih mempunyai 2 jenis kelemahan yaitu :

1. CAMEL tidak mengevaluasi struktur finansial yang disajikan dalam neraca. Struktur neraca mempunyai dampak langsung pada efisiensi dan perolehan keuntungan. Efisiensi dan keuntungan pada neraca saldo sangat penting untuk mengefektifkan dan mempertahankan koperasi kredit dalam lingkungan yang kompetitif.
2. CAMEL tidak mempertimbangkan tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan total aset merupakan strategi kunci yang digunakan untuk menunjukkan berbagai masalah yang menyertai devaluasi moneter dan inflasi yang tidak terkendali. (David C. RivHanson di Madison, Wisconsin, USA : WOCCU,2002)

PEARLS		CAMEL	
P	: Protection	C	: Capital Adequacy
E	: Financial Structure	A	: Asset Quality
A	: Asset Quality	M	: Management
R	: Rates of Return & Cost	E	: Earnings
L	: Liquidity	L	: Liquidity
S	: Signs of Growth		

CAMEL diciptakan sebagai alat pengawasan bukan alat manajemen. CAMEL tidak dirancang sebagai alat untuk analisis semua area kunci operasional koperasi kredit.

Dalam sistem penilaian analisis laporan keuangan yang digunakan oleh koperasi kredit Bina Warga sekarang ini adalah dengan sistem dari Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) oleh karena itu penulis ingin membandingkan sistem penilaian Inkopdit dengan SK Menkop No 194/KEP/M/IX/1998.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus mengenai suatu obyek tertentu, selama kurun waktu tertentu, dengan cukup mendalam dan menyeluruh, termasuk lingkungan dan kondisi masalahnya. Kasus hanya berlaku untuk koperasi kredit Bina Warga di Surakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta, dan waktu pelaksanaan pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2004-2006.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait sebagai pemberi informasi dalam penelitian. Pihak-pihak yang terkait adalah ketua koperasi, bendahara dan pengurus lain yang ditunjuk.
- b. Obyek penelitian ini adalah Laporan keuangan Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta, periode tahun 2002 sampai dengan 2004 meliputi neraca dan perhitungan hasil usaha.

D. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu :

- a. Laporan keuangan Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta tahun 2002-2004
- b. Sejarah terbentuknya Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta
- b. Struktur organisasi Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta
- d. Gambaran umum Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta
- e. Data lain yang mendukung (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta.

E. Teknik pengumpulan Data

- a. Wawancara

Dalam metode ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan bendahara, untuk memperoleh data mengenai gambaran umum koperasi.

- b. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti melihat dan mempelajari catatan-catatan aktivitas, arsip-arsip, dokumen-dokumen untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, neraca, dan laporan rugi-laba.

- c. Kuisisioner

Membuat daftar pernyataan yang berhubungan dengan masalah manajemen yang dinilai dalam koperasi, meliputi aspek permodalan, kualitas aset, pengelolaan, rentabilitas, dan likuiditas.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah Analisis Rasio untuk menilai kesehatan koperasi (kriteria penilaian kesehatan koperasi menurut Inkopdit dan Keputusan Menteri No. 194/KEP/M/IX/1998), yang mana alat untuk menilai kesehatan tersebut dapat diartikan atau dapat diasumsikan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan koperasi Kredit. Menurut Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) beberapa macam rasio untuk menilai kesehatan koperasi kredit yaitu:

a. Rasio Modal Produktif

Modal produktif adalah modal yang dapat digunakan bagi koperasi kredit untuk mendukung kegiatan operasional koperasi.

Modal Produktif = Modal yang diputar, meliputi:

- Simpanan anggota (saham)
- Pinjaman dari Silang Pinjam (Koperasi Sekunder)
- Pinjaman dari pihak ketiga.

Untuk mengetahui berapa besar atau prosen modal produktif yang terdapat pada koperasi kredit, dibandingkan dengan seluruh kekayaan (asset) yang ada.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Modal Produktif}}{\text{Jumlah Kekayaan}} \times 100\%$$

Rasio modal produktif ideal di atas 85%, artinya apabila semakin tinggi rasio modal produktif yang dimiliki suatu koperasi berarti cukupnya atau kesanggupan koperasi dalam memberikan pinjaman bagi para anggotanya.

b. Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui pengendalian biaya terhadap pendapatan

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Seluruh Biaya}}{\text{Jumlah Seluruh Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi ideal di bawah 40%, artinya didalam melaksanakan kegiatannya atau usahanya koperasi kredit harus dapat mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkannya, dengan penilaian terhadap efisiensi inilah koperasi kredit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini menunjukkan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi.

c. Rasio Kelalaian Pinjaman

Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat kelalaian pinjaman.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Kelalaian (Jatuh Tempo)}}{\text{Jumlah Saldo Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kelalaian pinjaman ideal di bawah 3%, artinya usaha simpan pinjam tidak dapat berkembang dan lancar karena seringnya pinjaman anggota mengalami kemacetan bahkan adakalanya tidak tertagih, sehingga hal ini tidak menguntungkan koperasi maka hasilnya harus kurang dari 3%.

d. Rasio Pinjaman Terhadap Modal Produktif

Untuk mengetahui berapa persen besarnya modal produktif terserap untuk pinjaman.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Saldo Pinjaman}}{\text{Jumlah Modal Produktif}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman terhadap modal produktif ideal di atas 85% artinya karena tujuan utama koperasi kredit adalah mengumpulkan dana dari anggotanya dan diharapkan modal produktif tersebut dapat bermanfaat bagi anggotanya serta digunakan untuk kesejahteraan bagi anggotanya maka hasilnya harus lebih dari 85%.

e. Rasio Distribusi Pinjaman

Untuk mengetahui berapa persen dari anggota yang memanfaatkan pinjaman dalam kurun waktu tertentu.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Peminjam}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100\%$$

Rasio distribusi pinjaman ideal di atas 60 %, artinya dalam mendistribusikan pinjaman pengurus berusaha untuk dapat membagikan dana pinjaman seadil-adilnya sehingga para anggota dapat merasakan manfaat koperasi maka dana pinjaman harus lebih dari 60%.

f. Rasio Rentabilitas

Untuk mengetahui berapa persen besarnya pendapatan yang dapat dihasilkan dari kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan (1 th)}}{\text{Jumlah Rata-rata Kekayaan (1 th)}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas ideal di atas 20%, artinya penilaian terhadap koperasi untuk dapat menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari usaha simpan

pinjam yang koperasi jalankan harus di atas 20%. Pendapatan koperasi kredit berasal dari bunga piutang dan komisi.

g. Rasio Solvabilitas

Koperasi kredit diukur dari solvabilitasnya maka koperasi tersebut dinilai dari kemampuannya dalam menghadapi atau memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat tertentu.

Untuk mengetahui kemampuan koperasi kredit mengembalikan atau memenuhi kewajiban-kewajibannya, apakah koperasi kredit itu dapat mengembalikan pinjamannya.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kekayaan-Utang-Tunggakan}}{\text{Jumlah Simpanan (Saham)}} \times 100\%$$

Rasio solvabilitas ideal di atas 100%, artinya koperasi diharapkan dapat membayar hutang-hutangnya dengan tidak mengganggu pelayanan terhadap anggotanya, maka solvabilitasnya harus di atas 100%.

h. Rasio Ketangguhan Dana Cadangan

Untuk mengetahui kemampuan dana cadangan menutup resiko.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Dana Cadangan}}{\text{Jumlah Kelalaian Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ketangguhan dana cadangan ideal diatas 100%, artinya dana cadangan digunakan untuk menutup resiko kemacetan pinjaman yang terjadi, koperasi harus menyediakan dana cadangan 100% atau paling tidak sama dengan jumlah dana yang dipinjamkan, bila terjadi pinjaman

macet dan dana cadangan tidak mencukupi untuk menutup kemacetan pinjaman maka usaha koperasi tidak dapat berjalan.

i. Rasio Perputaran Modal (Turn Over)

Untuk mengetahui kecepatan perputaran modal produktif.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pinjaman Dikabulkan}}{\text{Jumlah Kekayaan Rata-rata 1 th}} \times 100\%$$

Rasio perputaran modal ideal diatas 100% atau makin tinggi makin baik, artinya perputaran modal koperasi yang baik akan mendukung usaha koperasi karena pinjaman yang akan diberikan kepada anggota semakin banyak dan banyak pula anggota yang bisa menikmati manfaat tersebut dan dapat menguntungkan koperasi (pendapatan semakin banyak) dengan asumsi tidak ada kemacetan.

j. Rasio Bunga Atas Simpanan Anggota

Terdapat dua jenis bunga untuk anggota yaitu bunga yang diberikan koperasi karena jasa anggota yang dihitung dari deviden diberikan setiap tahun pada saat RAT dan bunga simpanan anggota (harian, per bulan, dan berjangka).

Untuk mengetahui berapa bunga atas simpanan anggota sesungguhnya di koperasi kedit tersebut.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Deviden Tersedia}}{\text{Jumlah Simpanan (Saham)}} \times 100\%$$

Rasio bunga atau simpanan anggota ideal di atas 12%, artinya koperasi yang benar-benar baik apabila mampu memberikan bunga kepada anggotanya lebih dari 12% per tahun.

k. Rasio Pertumbuhan Nominal

Untuk mengetahui prosentase pertumbuhan koperasi kredit dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (Saham + Dana Cadangan) th. ini} - \text{Jumlah (Saham + Dana Cadangan) th. lalu}}{\text{Jumlah (Saham + Dana Cadangan) th. lalu}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan nominal ideal di atas 10% atau makin tinggi makin baik, artinya koperasi diharapkan terus berkembang terutama pada pertumbuhan keuangannya, sehingga pelayanan terhadap anggotanya dapat maksimal serta koperasi diharapkan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.

Perhitungan-perhitungan di atas merupakan rasio-rasio yang kemudian akan dicari nilai ideal dari rasio penjumlahan hasil-hasil rasio tersebut dan membaginya dengan banyaknya komponen yang akan dihitung, kemudian ditetapkan predikat kesehatan koperasi yang dapat juga diasumsikan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan koperasi menurut Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Predikat Kesehatan Koperasi Menurut Inkopdit

<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
76%-100%	SEHAT
51%-75%	CUKUP SEHAT
26%-50%	KURANG SEHAT
0%-25%	TIDAK SEHAT

Sumber : Inkopdit

Sebagai perbandingan analisis rasio diatas, peneliti menggunakan perhitungan lain yang penulis kutip dari Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi terdapat beberapa aspek yang dinilai dengan memberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit nol sampai dengan seratus.

Tabel 4 Lembar Kerja Penilaian Kesehatan Menurut Keputusan Menteri Koperasi No. 194/KEP/M/IX/1998

Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)
1. Permodalan	a)Rasio modal sendiri terhadap total asset b)Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko	20% 10% 10%
2. Kualitas Aktiva produktif	a)Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan b)Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan c)Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah	30% 10% 10% 10%
3. Manajemen	a) Permodalan b) Kualitas asset positif c) Manajemen d) Rentabilitas e) Likuiditas	25% 5% 5% 5% 5%
4. Rentabilitas	a)Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional b)Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset c)Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional	15% 5% 5% 5%
5. Likuiditas	Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	10%
TOTAL		100%

1. Permodalan

Penilaian terhadap permodalan dimaksudkan untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. Koperasi harus memiliki modal ekuitas sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu kedudukan dan status modal koperasi secara hukum dipertegas dengan

menetapkan modal sendiri yang merupakan ekuitas, sedang modal pinjaman merupakan modal penunjang.

Beberapa aspek permodalan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan menurut SK Menkop. No. 194/KEP/M/IX/1998 adalah sebagai berikut:

- a) Rasio antara modal sendiri terhadap total asset, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi simpan pinjam dalam pendanaan terhadap total asset.

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi kredit untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan.

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

Dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan bobot penilaian untuk mentaksir permodalan.

- a). Rasio antara modal sendiri terhadap total asset.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka diberikan nilai kredit 0 (nol), artinya bahwa bila koperasi kredit tidak

memiliki modal sendiri atau minus karena kerugiannya lebih besar dari modal sendiri koperasi kredit.

- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 5 (lima) dengan maksimum nilai 100%.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% akan diperoleh skor.

b). Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka diberikan nilai kredit 0 (nol).
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum nilai 100%.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% akan diperoleh skor.

Penjumlahan angka skor **a** dengan angka skor **b** merupakan angka skor permodalan.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Digunakan sebagai alat mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber-sumber daya sebagaimana digariskan oleh kebijakan perusahaan.

Kualitas Aktiva Produktif dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Menurut SK. Menkop. No. 198/KEP/M/IX/1998 didasarkan pada tiga rasio yaitu :

- a) Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Rumus :

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Total Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

- b) Rasio antara risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus :

$$\frac{\text{Resiko Pinjaman Bermasalah}}{\text{Total Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

- c) Rasio antara cadangan risiko dengan risiko bermasalah.

Rumus :

$$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Resiko Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan bobot penilaian untuk menaksir Kualitas Aktiva Produktif.

- a). Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 60% diberikan nilai kredit 100, sedangkan untuk rasio lebih kecil dari 60% diberikan nilai kredit 0 (nol). Artinya koperasi kredit dinilai baik apabila pinjaman diberikan kepada anggota minimal 60% dari volume pinjaman yang diberikan.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% akan diperoleh skor.

- b). Rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio 50% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol). Artinya bila prosentase pinjaman bermasalah sebesar 50% atau lebih dari pinjaman yang diberikan maka nilai kreditnya 0 (nol).
- Untuk penurunan rasio 1%, nilai kreditnya ditambah 2 (dua) dengan maksimum nilai kredit 100.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% akan diperoleh skor.

c). Rasio antara cadangan risiko dengan risiko pinjaman bermasalah.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio 0% (tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0 (nol)).
- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% maka nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% akan diperoleh skor.

Penjumlahan angka skor **a** dengan angka skor **b** dengan angka skor **c** merupakan angka skor kualitas aktiva produktif.

3 Manajemen

Tujuan dari aspek manajemen adalah untuk menjaga kegiatan usaha koperasi tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Disisi lain keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh aspek manajemen yang ada dan dijalankan oleh koperasi yang bersangkutan.

Penilaian manajemen meliputi lima komponen yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, pengelolaan, rentabilitas, dan likuiditas. Dalam

penilaian aspek manajemen ini mengandung jawaban positif dan negatif. Penilaian aspek manajemen dikatakan positif, apabila lima komponen yang dinilai dan dijalankan oleh koperasi, sebaliknya manajemen akan dikatakan negatif, apabila ketentuan pada lima komponen tidak ada atau ada tetapi tidak dijalankan.

- Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 25 (dua puluh lima).
- Setiap jawaban dinilai positif diberi kredit sebesar 4 (empat).
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 25% akan diperoleh skor.

4. Penilaian Rentabilitas

Digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh sisa hasil usaha selama periode tertentu. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2001: 33). Ada tiga penilaian terhadap Rentabilitas yaitu:

- a) Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional.

Rumus :

$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

- b) Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset.

Rumus :

$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Rumus :

$$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan bobot penilaian untuk menaksir Rentabilitas.

a). Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional.

Cara penilaian bobot:

- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 20 (dua puluh) dengan maksimum nilai kredit 100.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% akan diperoleh skor.

b). Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio 0 (nol) atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol).
- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambahkan 10 (sepuluh) dengan maksimum nilai kredit 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5% akan diperoleh skor.

c). Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio 100% atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol).
- Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1% mulai dari 100%, nilai kredit ditambah 10 (sepuluh) dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5% akan diperoleh skor.

Penjumlahan angka skor **a** dengan angka skor **b** dengan angka skor **c** merupakan angka skor kualitas aktiva produktif.

5. Penilaian Likuiditas

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek tepat pada waktunya. Jadi likuiditas adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian terhadap likuiditas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan dana yang diterima.

Rumus :

$$\frac{\text{Total Volume Pinjaman Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan bobot penilaian untuk mentaksir Likuiditas.

Rasio antara pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.

Cara penilaian bobot:

- Untuk rasio 90% atau lebih diberi nilai 0 (nol), dan untuk rasio dibawah 90% atau lebih kecil diberi nilai kredit 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5% akan diperoleh skor

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap semua komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam, yang dibagi dalam empat golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan keuangan koperasi simpan pinjam menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No 194/KEP/M/IX/1998 dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

Tabel 5 Predikat Kesehatan Koperasi Menurut Keputusan Menteri Koperasi No 194/KEP/M/IX/1998

<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
81% - 100%	SEHAT
67% - <80%	CUKUP SEHAT
52% - <66%	KURANG SEHAT
0% - <51%	TIDAK SEHAT

Sumber : Kepmen no 194/KEP/M/IX/1998

G. Perbandingan Antara Kriteria Keuangan Menurut Induk Koperasi Kredit Indonesia Dengan Kriteria Kinerja Keuangan Menurut Keputusan Menteri Koperasi

Perbandingan ini hanya untuk membuktikan apakah Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta, baik menurut kriteria dari Menteri Koperasi maupun dari Inkopdit, dapat menghasilkan analisa dan kesimpulan yang sama, dalam menilai kinerja keuangan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Latar Belakang Timbulnya Gerakan Koperasi Kredit di Indonesia

Gerakan koperasi kredit (*credit union*) di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an. Koperasi ini didirikan oleh sukarelawan dan pemerintah dengan prinsip Raiffeisen, yaitu :

1. Tabungan hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja dan bentuk tabungan dari anggota tersebut adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.
2. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja.
3. Jaminan terbaik dari anggota-anggotanya adalah watak si peminjam itu sendiri, maksud watak disini adalah sikap dan perbuatan seseorang apakah ia dapat dipercaya untuk bertanggungjawab atas pinjaman yang ia ajukan, tidak memikirkan diri sendiri melainkan saling melayani.

Sekitar tahun 1960-an, pada saat inflasi melanda Indonesia, banyak usaha dibidang simpan pinjam menjadi lumpuh karena tidak dapat menentang inflasi yang kian tinggi. Koperasi simpan pinjam kemudian beralih fungsi menjadi koperasi konsumsi sebab uang yang mereka pinjam tidak dipergunakan sebagai modal produktif melainkan hanya digunakan untuk membeli sembako. Akhirnya koperasi ala Raiffeisen tidak dapat melanjutkan operasionalnya dan kemudian dibuat koperasi serba usaha.

Perubahan kondisi moneter pada awal pemerintahan orde baru, disaat ekonomi negara cenderung stabil pada tahun 1967, hal ini memberi angin segar kepada koperasi kredit untuk menggerakkan kembali koperasi kredit. Mr. A.A. Baliley, tokoh credit union dari Biro Pengembangan Credit Union Sedunia atau *World Council of Credit Union (WOCCU)*, datang ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Departemen Koperasi RI, dalam usahanya untuk menghadiri dan mengembangkan gerakan koperasi kredit di Indonesia.

Setelah memperoleh ijin pemerintah Indonesia, kemudian WOCCU membentuk suatu organisasi yang fungsinya sebagai wakil WOCCU dalam pengembangan koperasi kredit di Indonesia, yang disebut Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK₃I) atau *Credit Union Coordination of Indonesia (CUCOI)*, di Jakarta yang diresmikan pada tanggal 5 Januari 1970, badan ini mempunyai peran antara lain:

1. Memberikan konsultasi dan bimbingan mengenai koperasi kredit baik secara teknis maupun dalam bentuk motivasi atau penerangan.
2. Menyusun bahan-bahan dan menyusun program-program pendidikan koperasi kredit.
3. Membina para penggerak koperasi kredit dalam rangka kepemimpinan bagi perkembangan pergerakan koperasi kredit di Indonesia.
4. Menyelenggarakan kursus-kursus koperasi kredit, seperti: kursus dasar, kursus kepemimpinan, kursus manajer, kursus auditing, kursus wirakop, kursus bagi calon pelatih dan lain-lain.

5. Mengumpulkan data dan materi yang berguna bagi kepentingan gerakan koperasi kredit di Indonesia.
6. Menyediakan bahan-bahan pendidikan dan penerangan serta menerbitkan publikasi perihal koperasi kredit, yaitu antara lain: bulletin/majalah, buku-buku, brosur dan lain-lain.
7. Merintis pembentukan Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK₃D) di seluruh Nusantara.

Perkembangan koperasi kredit di Indonesia semakin baik sehingga BK₃I sekarang telah menjadi Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dan sudah berbadan hukum.

B. Koperasi Kredit Bina Warga

Koperasi Kredit Bina warga didirikan pada tahun 1973 dengan nama Credit Union Bina Warga (CUBW). Perubahan nama dari credit union menjadi koperasi kredit terjadi pada tahun 1976 dalam upaya untuk mendapatkan status badan hukum, sebab salah satu syarat adalah harus menggunakan nama dalam istilah bahasa Indonesia, dan akhirnya Koperasi Kredit Bina Warga memperoleh badan hukum No. 110/BH/KDK.11-031/VII tanggal 17 Juli 1999.

Pada saat berdiri Koperasi Kredit Bina Warga beranggotakan 22 orang, sebagai pendirinya adalah Wisnoe Soewardi (alm) dan N.D Soemarno, ide untuk mendirikan Koperasi kredit Bina Warga ini tercuat saat kedua tokoh ini menjabat sebagai Dewan Paroki di Gereja Santa Perawan Maria

Purbowardayan, Surakarta dan menangani bidang sosial ekonomi. Kedua tokoh ini mendapat ide saat mereka diundang ke Jakarta dalam usaha memajukan sosial ekonomi umat secara mandiri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain, akhirnya timbul ide untuk membuat koperasi kredit sebagai cara untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi umat dan kemudian lahirlah Koperasi Kredit Bina Warga.

Koperasi Kredit Bina Warga menetapkan simpanan pada saat berdiri sebesar Rp 1.000,00 untuk simpanan pokok dan simpanan sukarela sebesar Rp 200,00 tiap bulan untuk setiap anggotanya. Tahun 1973-1979 Bina Warga belum mempunyai kantor sehingga untuk mengadakan pertemuan dan transaksi simpan pinjam dilakukan di rumah-rumah anggota secara bergiliran dan kepengurusannya pun juga sangat sederhana, belum terbentuk kepengurusan ini disebabkan sedikitnya anggota, sehingga pada saat pendirian kepengurusannya hanya ketua dan bendahara saja.

Tahun 1980 untuk pertama kalinya terbentuk kepengurusan secara lebih lengkap dengan susunan sebagai berikut :

1. Pengurus

- a. Ketua : St. Sardi Sastrosarjono
- b. Wakil Ketua : T. Suprpto
- c. Sekretaris : A.J. Ratno Widodo
- d. Bendahara : Y. Suwarno

2. Badan Pemeriksa

- a. Ketua : Ig. Sutarto
- b. Sekretaris : P. Katiman
- c. Anggota : I. Wisnoe Soewardi

Pada kepengurusan ini mulai diperhatikannya pendidikan berkoperasi, ini terbukti dengan mewajibkan anggota-anggota Koperasi Kredit Bina Warga untuk mengikuti kursus dasar koperasi kredit yang waktu itu di bawah bimbingan langsung dari Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK₃I), setelah kursus tersebut hasil yang dibawa dari kursus tersebut cukup menggemirakan karena adanya kemajuan dibidang kepengurusan pada Koperasi Kredit Bina Warga yaitu penambahan panitia kredit yang bertujuan untuk meneliti, mempertimbangkan segala pengajuan pinjaman dan memberikan rekomendasi pencairan pinjaman dari anggota. Panitia kredit ini terdiri dari:

- a. Ketua : H.Y. Sudarmo
- b. Wakil Ketua : P. Katiman
- c. Sekretaris : Ny. Th. Soeprapto

Pelaksanaan transaksi juga mengalami perubahan setelah terbentuknya kepengurusan yang lengkap, transaksi dilakukan pada suatu tempat yaitu rumah Bapak T. Soeprapto, dengan adanya kantor tersebut maka hasilnya perkembangan anggota semakin banyak, hal ini mengakibatkan simpanan pokok dan simpanan wajib mengalami kenaikan, karena simpanan-simpanan tersebut untuk mengatasi masalah kebutuhan pinjaman anggota,

selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anggota maka simpanan pokok dinaikkan menjadi Rp 1.000,00 dan simpanan wajib menjadi Rp 200,00 per bulan dan simpanan sukarela paling sedikit Rp 100,00. Transaksinya hanya terjadi pada minggu kedua setiap bulannya.

Pada periode 1980-an Koperasi Kredit Bina Warga sempat mengalami kemunduran dalam simpanan dan pengambilan pinjaman, bahkan terjadi kemacetan dalam hal pengembalian kredit yang mencapai lebih dari 50%. Kadaan ini disebabkan oleh kurang tanggapnya pengurus pada tuntutan perbaikan pelayanan terhadap anggota dan akhirnya banyak yang keluar.

Krisis yang terjadi dalam tubuh Koperasi Kredit Bina Warga sedikit demi sedikit dapat teratasi dengan terbentuknya kepengurusan baru pada tahun 1990 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Pengurus

- a. Ketua : Drs. A.Y. Ratno Widodo
- b. Wakil Ketua : Suharno
- c. Sekretaris : Y. Waluyo
- d. Bendahara : Y. Rejo Mulyono
- e. Bendahara II : Ny. Kasidi

2. Badan Pemeriksa

- a. Ketua : P. Kastulu
- b. Sekretaris : Suhardi
- c. Anggota : P. Katiman

3. Panitia Kredit

- a. Ketua : Ag. Suprpto
- b. Sekretaris : Ny. Th. Soeprpto
- c. Anggota : Walidi Setyo Utomo

Berkat kegigihan kepengurusan yang baru, permasalahan yang ada pada Koperasi Kredit Bina Warga akhirnya dapat diatasi dan membawa Koperasi Kredit Bina Warga kembali hidup normal dan dinamis.

Sekarang kantor Koperasi kredit Bina Warga telah pindah ke kantor yang baru, alamat kantor Koperasi Kredit (Kopdit) Bina Warga yang baru adalah Nayu Barat Rt. 04 Rw. XII, Nusukan, akan tetapi hingga sekarang Kopdit Bina Warga masih menyewa pada alamat yang sama dan sejak mempunyai kantor yang baru tersebut berdasarkan keputusan rapat anggota 1992 transaksi simpan pinjam dilaksanakan setiap hari di kantor, dengan jam kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan sekarang simpanan pokok telah naik menjadi Rp 10.000,00 dan simpanan wajib menjadi Rp 5.000,00 setiap bulan dengan anggota 214 orang dan memiliki seorang karyawan untuk transaksi setiap hari.

Seiring dengan berjalannya waktu Kopdit Bina Warga sekarang terdapat banyak perkembangan, sehingga kini tercatat 667 orang anggota pada akhir tahun 2004 dan memiliki asset kurang lebih Rp 1.700.000.000,00. Pendidikan untuk koperasipun berjalan dengan baik dan anggota semakin bertambah. Simpanan pokok sekarang menjadi Rp 100.000,00, untuk simpanan wajib tetap per bulan Rp. 10.000,00, uang administrasi Rp. 5000,00,

dan dana kantor sejumlah Rp 12.000,00, sedangkan simpanan sukarela paling sedikit Rp. 5.000,00 per bulan, asuransi kesehatan sehingga anggota yang lama dan yang baru harus membayar sejumlah Rp 132.000,00, tapi untuk anggota yang lama hanya menambah sejumlah kekurangannya saja. Untuk susunan kepengurusan yang baru periode 2002-2004 antara lain:

1. Pengurus

- a. Ketua : Drs. A.Y. Ranto Widodo
- b. Wakil Ketua : P. Katiman
- c. Sekretaris : V. Panca Wiharta
- d. Bendahara : Y. Rejo Mulyono
- e. Bendahara II : H.Y. Kasidi

2. Badan Pemeriksa

- a. Ketua : Suhardi, B.Sc
- b. Sekretaris : V. Sri Anggorosiwi

3. Panitia Kredit

- a. Ketua : Walidi Setyo Utomo
- b. Sekretaris : Yuli Susana
- c. Anggota : F.X. Joko Purwoko

4. Karyawan

- a. Administrasi Pembukuan : Heribertus Wahyu Aristyanto
- b. Kolektor : 1. Heru Hernowo
2. Dewi Sari Ningsih (Tawangmangu)

Koperasi Kredit bina Warga yang dulunya bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi umat Katholik dan dikelola orang-orang yang beragama Katholik sekarang berubah pandangan, sekarang Kopdit Bina Warga membuka keanggotaannya bagi masyarakat umum tanpa memandang agama.

C. Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi

Alat perlengkapan organisasi koperasi kredit biasanya terdiri dari:

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
2. Pengurus, yang bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan bertanggungjawab pada rapat anggota.
3. Badan pemeriksa, bertugas mengawasi jalannya kegiatan koperasi kredit.

Pelaksanaan sehari-hari pelayanan usaha berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada rapat anggota yang dulu, dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk, orang tersebut harus mampu dan terampil dalam pencatatan transaksi-transaksi sehari-hari dan memberikan pelayanan yang baik kepada para anggota yang ingin bertransaksi sehari-hari. Orang tersebut diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.

D. Struktur Organisasi Koperasi Kredit Bina Warga

Susunan pengurus inti dalam koperasi memiliki tugas atau tanggungjawab yang berbeda-beda, yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan forum tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota tahunan, Pengurus, Badan Pemeriksa, Panitia Kredit dan Karyawan menyampaikan pertanggungjawabannya selama satu tahun buku.

2. Pengurus yang terdiri dari Dewan Pimpinan dan Panitia Kredit

a. Dewan Pimpinan

Dalam Koperasi Kredit Bina warga, Dewan Pimpinan terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara I, dan Bendahara II. Tugas dari Dewan Pimpinan adalah membuat pola-pola kebijakan koperasi, dan memimpin, serta mengendalikan koperasi menuju sasaran.

b. Panitia Kredit

Panitia Kredit terdiri dari tiga jenis jabatan yaitu: Ketua, Sekrertaris, Anggota. Tugas dari panitia kredit adalah menilai dan memutuskan suatu pengajuan kredit dari anggota. Keputusan dari panitia kredit inilah yang menjadi dasar bagi bendahara untuk mengeluarkan uang atau pencairan uang kepada anggota, tapi dalam prakteknya dari cepatnya pelayanan pengajuan kredit dari anggota, bendahara dapat mencairkan dana dari pengajuan kredit anggota tanpa ada persetujuan dulu dari panitia kredit akan tetapi dengan sepengetahuan ketua

koperasi. Masalah itu hanya terjadi pada pengajuan kredit yang jumlahnya kecil (kurang dari satu juta rupiah) untuk pengajuan kredit yang besar keadaannya tetap harus meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada panitia kredit.

3. Badan Pemeriksa

Badan Pemeriksa terdiri dari tiga jenis jabatan pula, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tugasnya adalah menjaga kesehatan koperasi, mengumpulkan data-data yang penting bagi kemajuan koperasi dan melaporkannya kepada rapat anggota. Selain itu badan pemeriksa berkewajiban mengawasi kerja pengurus, walaupun kedudukannya adalah sejajar. Pengurus tidak bertanggungjawab kepada badan pemeriksa.

4. Panitia Pendidikan

Tugas dari panitia pendidikan adalah melaksanakan program pendidikan baik untuk anggota koperasi (pengurus dan karyawan) maupun kepada masyarakat (calon anggota) dan promosi. Dalam Kopdit Bina Warga panitia pendidikan hanya bersifat temporal. Panitia pendidikan hanya dibentuk apabila akan ada suatu pelatihan atau kursus-kursus. Panitia pendidikan kedudukannya langsung dibawah wakil ketua dari dewan pimpinan.

5. Karyawan

Tugas karyawan adalah menjalankan pengelolaan koperasi dalam sehari-harinya. Sekarang ini Koperasi Kredit Bina Warga sudah memiliki tiga orang karyawan. Dalam kegiatannya karyawan Kopdit Bina Warga

dibantu oleh pengurus dan bendahara, jadi tugas karyawan hanya menerima uang dari anggota, kemudian melaporkannya kepada bendahara, untuk pengeluaran langsung dipegang bendahara.

E. Daerah Kerja Koperasi Kredit Bina Warga

Kopdit Bina Warga berkedudukan di Nayu Barat, jalan Majapahit IV, RT 04/RW XII, Kalurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Daerah kerja Kopdit Bina Warga meliputi warga atau masyarakat Kalurahan Nusukan dan masih ada beberapa anggota yang berdomisili di luar Kalurahan Nusukan. Mereka yang berada di luar wilayah Nusukan bisa menjadi anggota dari kabar teman atau saudaranya (*gethok tular*) yang sudah menikmati menjadi anggota Kopdit Bina Warga, dengan tangan terbuka Kopdit Bina Warga menerima keikutsertaan mereka, sebab koperasi kredit menganut sifat *tanggung renteng* yaitu tanggungjawab bersama diantara anggota atau segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling mempercayai.

F. Permodalan Koperasi

Modal koperasi adalah suatu alat atau faktor yang berguna untuk produksi lebih lanjut. Alat-alat dalam pengertian modal adalah termasuk juga uang, jasa, dan lain-lain. Sumber-sumber modal Koperasi Kredit Bina Warga berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman, yaitu antara lain:

1. Modal Sendiri, menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 Pasal 41

Ayat 2, yaitu antara lain:

a. Simpanan Pokok

Merupakan jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya dan diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil oleh anggota selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi (keluar koperasi).

b. Simpanan Wajib

Jumlah simpanan yang diwajibkan koperasi kepada anggota untuk membayarkannya dalam kurun waktu tertentu, biasanya pembayarannya setiap bulan. Simpanan wajib dapat diambil oleh anggota selama masih menjadi anggota koperasi.

c. Dana Cadangan

Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, dengan maksud untuk menambah modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila terjadi kerugian.

d. Hibah

Adalah modal yang diberikan koperasi dengan cuma-cuma atau tidak dengan membayar imbalan tertentu.

2. Modal Pinjaman, berasal dari:

a. Simpanan Sukarela

Modal yang berasal dari simpanan atau tabungan anggota atau pun bukan anggota yang mempercayakan uang mereka, biasanya berupa simpanan bunga harian, simpanan bunga bulanan, dan simpanan bunga berjangka.

b. Pinjaman dari Koperasi lain atau Lembaga Keuangan lain

Adalah modal yang berasal dari jaringan Koperasi Kredit Daerah bernama BK₃D, dan berasal dari Departemen Koperasi serta UKM atau kadangkala dari pihak bank.

c. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang lainnya.

Modal koperasi yang diterima dari pihak perorangan atau koperasi lain yang merupakan suatu perjanjian hutang-piutang, yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah laporan keuangan Koperasi Kredit Bina Warga tahun buku 2002 sampai dengan tahun buku 2004. Laporan keuangan yang penulis sajikan adalah sebagai bahan untuk menilai kinerja keuangan atau untuk menilai kesehatan koperasi. Untuk menilai kesehatan koperasi tersebut peneliti menggunakan kriteria penilaian koperasi kredit menurut Inkopdit dan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No.194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

A. Laporan Keuangan Koperasi Kredit Bina Warga

Laporan keuangan Koperasi Kredit Bina Warga terdiri dari Neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha serta Data Statistik bulanan sebagai informasi tambahan. Laporan Keuangan Neraca Koperasi Kredit Bina Warga tahun 2002-2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Neraca Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004

NERACA		TAHUN		
NO.	AKTIVA	2002	2003	2004
	AKTIVA LANCAR			
100	Kas	Rp 40.149.857,00	Rp 97.501.356,00	Rp 215.932.954,00
110	Bank	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 88.340.000,00
	AKTIVA LANCAR LAIN			
150	Piutang Anggota	Rp 642.565.000,00	Rp 974.535.000,00	Rp 1.365.687.000,00
151	Piutang Ragu-ragu	Rp 5.215.209,00	Rp 9.134.658,00	Rp 10.670.533,00
200	Simpanan SPD	Rp 12.566.675,00	Rp 15.366.675,00	Rp 54.966.675,00
201	Investasi Sementara	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00
202	Biaya Bayar Dimuka	Rp 2.151.097,00	Rp 1.851.097,00	Rp 4.551.097,00
	AKTIVA TETAP			
340	Inventaris	Rp 2.147.375,00	Rp 2.147.375,00	Rp 29.080.925,00
341	Akumulasi Penyusutan Inventaris	Rp (844.000,00)	Rp (994.000,00)	Rp (1.144.000,00)
	JUMLAH	Rp 705.201.213,00	Rp 1.101.092.161,00	Rp 1.769.335.204,00
	PASIVA			
	HUTANG			
400	Sibuhar Anggota	Rp 66.758.014,00	Rp 108.813.679,00	Rp 238.591.414,00
401	Sisuka Anggota	Rp 27.090.000,00	Rp 106.700.000,00	Rp 80.700.000,00
402	Hutang Pihak ke III	Rp -	Rp 60.888.888,00	Rp 43.336.209,00
420	Hutang SPD	Rp 65.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 360.000.000,00
430	Dana Koperasi/Audit	Rp 3.376.827,00	Rp 7.334.780,00	Rp 10.230.100,00
441	Dana pendidikan	Rp 10.023.592,00	Rp 14.885.097,00	Rp 19.931.072,00
442	Dana Karyawan	Rp 1.374.009,00	Rp 1.662.212,00	Rp 7.963.322,00
443	Dana Sosial	Rp 3.318.565,00	Rp 5.600.166,00	Rp 7.883.911,00
444	Dana Resiko Kredit	Rp 22.951.426,00	Rp 36.409.435,00	Rp 54.726.585,00
445	Dana Kantor	Rp 5.638.170,00	Rp 8.854.170,00	Rp 12.664.170,00
447	Biaya Harus Dibayar	Rp 24.425.000,00	Rp 25.205.000,00	Rp 43.326.000,00
450	Dana Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp 262.500,00
	MODAL SENDIRI			
500	Simpanan Pokok	Rp 21.465.000,00	Rp 47.740.000,00	Rp 64.810.000,00
501	Simpanan Wajib	Rp 94.228.000,00	Rp 110.045.000,00	Rp 157.869.000,00
502	Simpanan Sukarela	Rp 180.146.700,00	Rp 258.201.122,00	Rp 350.962.555,00
540	Cadangan	Rp 44.825.820,00	Rp 65.581.107,00	Rp 81.467.292,00
550	SHU Tahun Berjalan	Rp 134.580.090,00	Rp 183.171.505,00	Rp 234.611.074,00
	JUMLAH	Rp 705.201.213,00	Rp 1.101.092.161,00	Rp 1.769.335.204,00

Sumber Data: Materi RAT 2002-2004

Tabel 7 Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004

No.	PENDAPATAN OPERASIONAL	TAHUN		
		2002	2003	2004
600	Bunga Pinjaman	Rp 193.848.225,00	Rp 249.300.850,00	Rp 401.384.765,00
601	Jasa Pelayanan/SF	Rp 7.126.600,00	Rp 9.962.750,00	Rp 13.699.850,00
602	Uang Pangkal	Rp 415.000,00	Rp 565.000,00	Rp 985.000,00
603	Denda	Rp 3.390.250,00	Rp 3.397.630,00	Rp 8.138.670,00
604	Deviden SPD	Rp 614.800,00	Rp -	Rp -
607	Pendapatan Lain	Rp 790.000,00	Rp 896.000,00	Rp 1.216.000,00
JML PENDAPATAN OPERASIONAL		Rp 206.186.875,00	Rp 264.122.230,00	Rp 425.424.285,00
NO.	BIAYA OPERASIONAL			
700	Bunga Utang SPD	Rp 20.262.500,00	Rp 6.512.500,00	Rp 69.009.000,00
701	Bunga Sibuhar	Rp 7.613.485,00	Rp 9.360.330,00	Rp 20.837.405,00
702	Bunga Utang Pihak ke III	Rp -	Rp -	Rp 9.583.337,00
703	Bunga Sisuka	Rp 1.560.000,00	Rp 8.894.920,00	Rp 12.118.169,00
704	Biaya Organisasi	Rp 1.482.500,00	Rp 2.100.000,00	Rp 1.637.500,00
705	Gaji Karyawan	Rp 7.200.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 16.100.000,00
706	Adm. Umum	Rp 1.270.500,00	Rp 1.424.750,00	Rp 2.331.800,00
707	Provisi SPD	Rp 400.000,00	Rp 500.000,00	Rp 3.150.000,00
708	Premi Daperma	Rp 6.650.800,00	Rp 8.522.800,00	Rp 12.720.000,00
709	Biaya Lain-lain	Rp -	Rp 6.430.425,00	Rp -
710	Hr. Petugas MF	Rp 740.000,00	Rp -	Rp -
711	Iuran solidaritas/RAT	Rp 24.425.000,00	Rp 25.205.000,00	Rp 43.326.000,00
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL		Rp 71.604.785,00	Rp 80.950.725,00	Rp 190.813.211,00
SISA HASIL USAHA		Rp 134.580.090,00	Rp 183.171.505,00	Rp 234.611.074,00
JUMLAH TOTAL		Rp 206.186.875,00	Rp 264.122.230,00	Rp 425.424.285,00

Sumber Data: Materi RAT 2002-2004

Keterangan:

1. Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka) adalah simpanan anggota diluar simpanan wajib dan sukarela dengan jangka waktu tertentu dengan bunga per tahun.
2. Simpanan Bunga Harian (Sibuhar) adalah simpanan anggota diluar simpanan wajib dan simpanan sukarela dengan bunga harian. Sebesar 12% per tahun.

3. Silang Pinjam Daerah (SPD) adalah suatu koperasi sekunder (koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi), dimana fungsi untuk mengelola uang yang ada di suatu wilayah, di Surakarta bernama BK₃D Surakarta.
4. Dana Perlindungan Bersama (Daperma) adalah asuransi bagi simpanan anggota maupun pinjaman anggota, apabila anggota tersebut mengalami cacat total atau meninggal dunia.
5. Provisi SPD adalah jasa yang diberikan kepada koperasi sekunder dalam hal ini adalah Puskopdit (BK₃D) atas pelayanan yang diberikan.
6. Iuran Solidaritas adalah iuran yang diberikan kepada koperasi yang berada di atasnya, yaitu Puskopdit berdasarkan kesepakatan bersama dan digunakan untuk membiayai organisasi koperasi.
7. Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU dengan maksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.
8. Saham merupakan modal penyertaan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
9. Kekayaan ialah seluruh harta yang dimiliki koperasi kredit dan dialokasikan untuk menunjang usaha koperasi.
10. Deviden adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada anggota berdasarkan jumlah modal yang disertakan didalam koperasi kredit.

Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui modal produktif koperasi kredit. Modal produktif adalah modal yang didistribusikan kepada

anggota yang berwujud piutang yang dapat menghasilkan pendapatan. Modal produktif terdiri dari:

Tabel 8 Perhitungan Modal Produktif Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004

NO	MODAL PRODUKTIF	TAHUN		
		2002	2003	2004
1.	Simpanan Anggota			
	a. Simpanan Pokok	Rp 21.465.000,00	Rp 47.740.000,00	Rp 64.810.000,00
	b. Simpanan Wajib	Rp 94.228.000,00	Rp 110.045.000,00	Rp 157.869.000,00
	c. Simpanan sukarela	Rp 180.146.700,00	Rp 258.201.122,00	Rp 350.962.555,00
	d. Dana Cadangan	Rp 44.825.820,00	Rp 65.581.107,00	Rp 81.467.292,00
	e. SHU Tahun Berjalan	Rp 134.580.090,00	Rp 183.171.505,00	Rp 234.611.074,00
2.	Pinjaman SPD	Rp 65.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 360.000.000,00
3	Pinjaman Bukan Anggota			
	a. Sibuhar	Rp 66.758.014,00	Rp 108.813.679,00	Rp 238.591.414,00
	b. Sisuka	Rp 27.090.000,00	Rp 106.700.000,00	Rp 80.700.000,00
	c. Dana-dana Lain	Rp 46.682.589,00	Rp 74.745.860,00	Rp 113.661.660,00
	d. Pihak ke-III	Rp -	Rp 60.888.888,00	Rp 43.336.209,00
	JUMLAH	Rp 680.776.213,00	Rp1.075.887.161,00	Rp1.726.009.204,00

Data yang telah diolah

Koperasi Kredit Bina Warga kemudian membagi Sisa Hasil Usaha tersebut menjadi:

Tabel 9 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Kredit Bina Warga Tahun 2002-2004

NO	REKENING	TAHUN		
		2002	2003	2004
1.	15% Dana cadangan	Rp 20.187.015,00	Rp 27.475.730,00	Rp 35.191.666,00
2.	10% Dana Resiko Kredit	Rp 13.458.009,00	Rp 18.317.150,00	Rp 23.461.107,00
3.	30% Jasa Modal	Rp 40.374.027,00	Rp 54.951.450,00	Rp 70.383.322,00
4.	20% Jasa Pinjaman	Rp 26.916.018,00	Rp 36.634.300,00	Rp 46.922.214,00
5.	10% Jasa Pengurus	Rp 13.458.009,00	Rp 18.317.150,00	Rp 23.461.107,00
6.	5% Dana Pendidikan	Rp 6.729.005,00	Rp 9.158.575,00	Rp 11.730.553,00
7.	4% Dana Karyawan	Rp 5.383.203,00	Rp 7.326.860,00	Rp 9.384.442,00
8.	4% Dana Pengembangan Koperasi/Audit	Rp 5.383.203,00	Rp 7.326.860,00	Rp 9.384.442,00
9.	2% Dana social	Rp 2.691.601,00	Rp 3.663.430,00	Rp 4.692.221,00
	JUMLAH	Rp 134.580.090,00	Rp 183.171.505,00	Rp 234.611.074,00

Data yang diolah

Jumlah deviden yang diterima oleh anggota berasal dari jumlah jasa modal dan jasa pinjaman masing-masing sebagai berikut:

2002	Rp. 40.374.027,00	
	<u>Rp. 26.916.018,00</u>	+
	Rp. 67.290.045,00	
2003	Rp. 54.951.450,00	
	<u>Rp. 36.634.300,00</u>	+
	Rp. 91.585.750,00	
2004	Rp. 70.383.322,00	
	<u>Rp. 46.922.214,00</u>	+
	Rp. 117.305.536,00	

B. Penilaian Kesehatan Koperasi Kredit Menurut Inkopdit

1. Rasio Modal Produktif

Rasio ini adalah sebagai pengukur seberapa besar modal produktif koperasi bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki untuk menunjang kelangsungan usaha koperasi.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Modal Produktif}}{\text{Jumlah Kekayaan}} \times 100\% = \dots\dots\dots \text{Ideal diatas } 85\%$$

Tabel 10 Rasio Modal Produktif Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Modal Prod.	Kekayaan	Rasio
2002	Rp. 680.776.213,00	Rp. 705.201.213,00	96,53%
2003	Rp. 1.075.887.161,00	Rp. 1.101.092.161,00	97,71%
2004	Rp. 1.726.009.204,00	Rp. 1.769.335.204,00	97,55%

Data yang telah diolah

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa modal yang dimiliki oleh Koperasi Kredit Bina warga belum cukup bila dibandingkan dengan kekayaan yang ada, sehingga modalnya belum cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya Kopdit Bina Warga harus menunggu sampai ada pembayaran atau angsuran dari anggota yang meminjam atau harus menambah pinjaman pada Silang Pinjam Daerah (SPD) untuk mencukupi kebutuhan anggotanya. Silang Pinjam Daerah adalah suatu usaha koperasi untuk menyimpan modal bila ada kelebihan modal atau meminjam modal, usaha ini dikelola oleh suatu badan yang bernama Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK₃D) Surakarta yang sekarang dikenal dengan nama Puskopdit.

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan dapat dikendalikan atau dapat ditekan seminimum mungkin, sehingga dapat memaksimumkan pendapatan.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Seluruh Biaya}}{\text{Jumlah Seluruh Pendapatan}} \times 100\% = \dots\dots\dots \text{Ideal dibawah } 40\%$$

Tabel 11 Rasio Efisiensi Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Biaya	Total Pendapatan	Rasio
2002	Rp. 71.604.785,00	Rp. 206.186.875,00	34,72%
2003	Rp. 80.950.725,00	Rp. 264.122.230,00	30,64%
2004	Rp. 190.813.211,00	Rp. 425.424.285,00	44,85%

Data yang telah diolah

Hasil yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga mampu melakukan efisiensi di tahun 2002-2003, tetapi ditahun 2004 Koperasi Kredit Bina Warga tidak mampu melakukan efisiensi karena idealnya rasio efisiensi adalah dibawah 40%. Rasio efisiensi yang paling efisien dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 30,64%, sedangkan SHU yang dibagikan sebesar Rp 183.171.505,00 (jumlah pendapatan dikurangi total biaya)

3. Rasio Kelalaian Pinjaman

Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelalaian anggota terhadap pinjaman yang telah direalisasikan. Kelalaian Pinjaman adalah anggota yang tidak membayar atau lalai membayar kewajibannya selama kurang dari dua bulan.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kelalaian (jatuh tempo)}}{\text{Jumlah Saldo Pinjaman}} \times 100\% = \dots\dots\dots \text{Ideal dibawah } 3\%$$

Tabel 12 Rasio Kelalaian Pinjaman Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Kelalaian	Total Saldo pinj.	Rasio
2002	Rp. 23.329.000,00	Rp. 642.565.000,00	3,63%
2003	Rp. 90.405.000,00	Rp. 974.535.000,00	9,27%
2004	Rp. 115.275.000,00	Rp. 1.365.687.000,00	8,44%

Data yang telah diolah

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini terdapat banyak kelalaian pinjaman oleh anggota atau anggota tidak tertib dalam membayar kewajibannya,

besarnya angka tersebut (idealnya dibawah 3%) hal ini terjadi disebabkan dari akumulasi kelalaian dari tahun sebelumnya dan hal ini akan mempengaruhi jalannya usaha koperasi.

Pengurus Koperasi Kredit Bina Warga harus dapat menekan angka kelalaian pinjaman tersebut dengan cara menyeleksi calon peminjam atau menyelidiki apakah calon peminjam dapat mengembalikan pinjaman, pengurus harus lebih ketat dalam memberikan pinjaman, pengurus harus menilai apakah tujuan pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan produktif atau hanya untuk tujuan konsumtif.

4. Rasio pinjaman Terhadap Modal Produktif

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya modal yang terserap untuk pinjaman produktif.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Saldo Pinjaman}}{\text{Jumlah Modal Produktif}} \times 100\% = \dots\dots\dots \text{Ideal diatas } 85\%$$

Tabel 13 Rasio Pinjaman Terhadap Modal Produktif Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Saldo Pinjaman	Total Modal Produktif	Rasio
2002	Rp. 642.565.000,00	Rp. 680.776.213,00	94,38%
2003	Rp. 974.535.000,00	Rp. 1.075.887.161,00	90,57%
2004	Rp. 1.365.687.000,00	Rp. 1.726.009.204,00	79,12%

Data yang telah diolah

Hasil tersebut membuktikan bahwa modal produktif pada Koperasi kredit Bina Warga hampir terserap seluruhnya sebagai pinjaman bagi anggota, karena idealnya di atas 85%.

5. Rasio Distribusi Pinjaman

Rasio untuk mengetahui seberapa bagus pelayanan Koperasi Kredit Bina Warga terhadap anggotanya.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Peminjam}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100\% = \dots \dots \dots \text{Ideal diatas } 60\%$$

Tabel 14 Rasio Distribusi Pinjaman Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Peminjam	Jumlah Anggota	Rasio
2002	401	444	90,31%
2003	485	517	93,81%
2004	942	667	141,22%

Data yang telah diolah

Hasil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2004, jumlah peminjam lebih besar dari pada jumlah anggota karena setiap anggota bisa meminjam lebih dari satu kali, tetapi dengan syarat pinjaman sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu. Sehingga hal ini menyebabkan rasionya lebih dari 100%. Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga lebih banyak memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya.

6. Rasio Rehabilitas

Rasio rentabilitas menggambarkan sejauh mana Koperasi Kredit Bina Warga mampu menghasilkan atau memperoleh pendapatan yang maksimal.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pendapata(1th)}}{\text{Jumlah Rata-rata Kekayaan(1th)}} \times 100\% = \dots\dots\dots \text{Ideal diatas } 20\%$$

$$\text{Rata - rata kekayaan} = \frac{\text{kekayaan tahun lalu} + \text{kekayaan tahun ini}}{2}$$

Dari data di koperasi kekayaan tahun 2001 sebesar 522.988.856

Tabel 15 Rasio Rentabilitas Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Pendapatan	Total Rata-rata Kekayaan	Rasio
2002	Rp. 206.186.875,00	Rp. 614.095.034,50	33,57%
2003	Rp. 264.122.230,00	Rp. 903.146.687,00	29,24%
2004	Rp. 425.424.285,00	Rp. 1.435.213.682,50	29,64%

Data yang telah diolah

Hasil perhitungan di atas menunjukkan rentabilitas Koperasi Kredit Bina Warga di atas ideal, hal ini disebabkan oleh efisiensi di dalam koperasi, sebab efesiensi sangat berpengaruh pada laporan rugi-laba pada suatu koperasi.

7. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan koperasi atau badan usaha lain untuk membayar kewajibannya.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Kekayaan-U tang - Tunggakan}}{\text{Jumlah Simpanan (saham)}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{Ideal diatas } 100\%$$

Tabel 16 Rasio Solvabilitas Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Tahun	Total Kekayaan	Total Hutang	Total Tunggakan	Total Simpanan	Rasio
2002	Rp 705.201.213,00	Rp 229.955.603,00	Rp 23.329.000,00	Rp. 475.245.610,00	95,09%
2003	Rp 1.101.092.161,00	Rp 436.353.427,00	Rp 90.405.000,00	Rp. 664.738.734,00	86,39%
2004	Rp.1.769.335.204,00	Rp 879.615.283,00	Rp 115.275.000,00	Rp. 889.719.921,00	87,04%

Data yang telah diolah

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang-hutang yang berasal dari anggota koperasi, sebab hasil yang didapat lebih dari seratus persen, sehingga Koperasi Kredit Bina Warga dapat dipercaya oleh anggota maupun koperasi lain dalam memberikan pinjaman kepada Koperasi Kredit Bina Warga karena Koperasi Kredit Bina warga dipandang mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

8. Rasio Ketangguhan Dana Cadangan

Kegunaan dari dana cadangan adalah untuk menutup resiko bila terjadi pinjaman bermasalah.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Dana Cadangan}}{\text{Jumlah Kelalaian Pinjaman}} \times 100\% \dots \dots \dots \text{Ideal diatas } 100\%$$

Tabel 17 Rasio Ketangguhan Dana Cadangan Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Dana Cadangan	Kelalaian Pinjaman	Rasio
2002	Rp. 44.825.820,00	Rp. 23.329.000,00	192,14%
2003	Rp. 65.581.107,00	Rp. 90.405.000,00	72,54%
2004	Rp. 81.467.292,00	Rp. 115.275.000,00	70,67%

Data yang telah diolah

Ketangguhan dana cadangan artinya dana cadangan tersebut dapat menutup semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pinjaman. Di tahun 2003 dan 2004 dana cadangan tidak dapat menutup kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pinjaman. Idealnya koperasi harus menyediakan dana cadangan 100% atau paling tidak sama dengan jumlah dana yang dipinjamkan.

9. Rasio Perputaran Modal (Turn Over)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kecepatan perputaran modal produktif suatu koperasi.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pinjaman dikabulkan}}{\text{Jumlah Kekayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots \text{Ideal diatas } 100\%$$

Tabel 18 Rasio Perputaran Modal Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Pinjaman Dikabulkan	Total Kekayaan	Rasio
2002	Rp. 715.010.000,00	Rp. 705.201.213,00	101,39%
2003	Rp. 996.275.000,00	Rp. 1.101.092.161,00	90,48%
2004	Rp. 1.365.760.000,00	Rp. 1.769.335.204,00	77,19%

Data yang telah diolah

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2002 dana yang tersedia untuk piutang, semuanya terserap sebagai pinjaman kepada anggota (lebih

dari 100%), pada tahun 2002 juga terlihat bahwa kekayaan koperasi menurun, hal ini disebabkan pada akhir tahun tersebut banyak anggota koperasi yang menarik tabungan.

10. Rasio Bunga Atas Simpanan Anggota

Rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa persen koperasi sanggup memberikan bunga terhadap simpanan anggota.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Deviden Tersedia}}{\text{Jumlah Simpanan (saham)}} \times 100\% \dots \dots \dots \text{Ideal diatas } 12\%$$

Koperasi Kredit membagikan devidennya berasal dari jasa modal ditambah dengan jasa pinjaman

2002:	Jasa Modal	Rp. 40.374.027,00
	Jasa pinjaman	Rp. 26.916.018,00
		Rp. 67.290.045,00
2003:	Jasa modal	Rp 54.951.450,00
	Jasa Pinjaman	Rp 36.634.300,00
		Rp 91.585.750,00
2004:	Jasa Modal	Rp 70.383.322,00
	Jasa pinjaman	Rp 46.922.214,00
		Rp 117.305.536,00

Tabel 19 Rasio Bunga Atas Simpanan Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Deviden	Total Simpanan	Rasio
2002	Rp. 67.290.045,00	Rp. 475.245.610,00	14,15%
2003	Rp. 91.585.750,00	Rp. 664.738.734,00	13,77%
2004	Rp. 117.305.536,00	Rp. 889.719.921,00	13,18%

Data yang telah diolah

Hasil tersebut telah dapat menjadi landasan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga dapat memberikan bunga yang cukup kepada anggota atas simpanan yang dipercayakan kepada Koperasi Kredit Bina Warga. Berarti modal yang ditanam di Koperasi Kredit Bina Warga memperoleh jasa yang layak, karena diatas bunga pasar ataupun bunga bank.

11. Rasio Pertumbuhan Nominal

Rasio untuk dapat mengetahui tumbuh dan berkembangnya suatu koperasi dari tahun ke tahun untuk dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut baik dan sehat.

$$\frac{\text{Jumlah (Saham+ Dana Cadangan) th.ini} - \text{Jumlah (Saham+ Dana Cadangan) th.lalu}}{\text{Jumlah (Saham+ Dana Cadangan) th.lalu}} \times 100 = \dots\dots \text{Ideal diatas } 10\%$$

2001:	Saham	Rp. 225.645.008,00
	Dana Cadangan	<u>Rp. 33.647.206,00 +</u>
		Rp. 259.292.214,00

2002:	Saham	Rp. 295.839.700,00
	Dana cadangan	<u>Rp. 44.825.820,00 +</u>
		Rp. 340.665.520,00

Rasio Pertumbuhan Nominal tahun 2002:

$$\frac{Rp \ 340.665.520,00 - Rp \ 259.292.214,00}{Rp \ 259.292.214,00} \times 100\%$$

2003:	Saham	Rp. 415.986.122,00
	Dana Cadangan	<u>Rp. 65.581.107,00 +</u>
		Rp. 481.567.229,00

Rasio Pertumbuhan Nominal tahun 2003:

$$\frac{Rp \ 481.567.229,00 - Rp \ 340.665.520,00}{Rp \ 340.665.520,00} \times 100\%$$

2004:	Saham	Rp. 573.641.555,00
	Dana cadangan	<u>Rp. 81.467.292,00</u> +
		Rp. 655.108.847,00

Rasio Pertumbuhan Nominal tahun 2004:

$$\frac{Rp\ 655.108.847,00 - Rp\ 481.567.229,00}{Rp\ 481.567.229,00} \times 100\%$$

Tabel 20 Rasio Pertumbuhan Nominal Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Jumlah Modal Tahun Ini - Tahun Lalu	Jumlah Modal Tahun Lalu	Rasio
2002	Rp. 81.373.306,00	Rp. 259.292.214,00	31,38%
2003	Rp.140.901.709,00	Rp. 340.665.520,00	41,36%
2004	Rp.173.541.618,00	Rp. 481.567.229,00	36,03%

Data yang telah diolah

Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga dengan perkembangan rata-rata setiap tahun sebesar 36,25%. Perkembangan ini berarti Koperasi Kredit Bina Warga mengalami pertumbuhan nominal yang baik, karena rasio pertumbuhan nominal yang ideal adalah diatas 10% sehingga berarti Koperasi Kredit Bina Warga mampu menjalankan usahanya.

Perhitungan-perhitungan di atas merupakan rasio-rasio yang kemudian akan dicari nilai idealnya dari rasio dengan menjumlahkan hasil-hasil rasio tersebut. Dan membaginya dengan banyaknya komponen yang di hitung, kemudian ditetapkan predikat kesehatan koperasi yang dapat juga diasumsikan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Nilai Predikat Kesehatan Koperasi Kredit Menurut Inkopdit

<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
76%-100%	SEHAT
51%-75%	CUKUP SEHAT
26%-50%	KURANG SEHAT
0%-25%	TIDAK SEHAT

Perhitungan dari rasio-rasio diatas, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 22 Hasil Perhitungan Rasio Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002 – 2004

No	Rasio	2002	2003	2004	Ideal
1	Modal Produktif	96,53%	97,71%	97,55%	> 85%
2	Efisiensi	34,72%	30,64%	44,85%	< 40%
3	Kelalaian Pinjaman	3,63%	9,27%	8,44%	< 3%
4	Pinj. Terhadap Modal produktif	94,38%	90,57%	79,12%	> 85%
5	Distribusi Pinjaman	90,31%	93,81%	141,22%	> 60%
6	Rentabilitas	33,57%	29,24%	29,64%	> 20%
7	Solvabilitas	95,09%	86,39%	87,04%	> 100%
8	Ketangguhan Dana Cadangan	192,14%	72,54%	70,67%	> 100%
9	Perputaran Modal(Turn Over)	101,39%	90,48%	77,19%	> 100%
10	Bunga Atas Simpanan Anggota	14,15%	13,77%	13,18%	> 12%
11	Pertumbuhan Nominal	31,38%	41,36%	36,03%	> 10%
	JUMLAH	787,29%	655,78%	684,93%	

Data yang telah diolah

Kemudian untuk memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai penilaian kesehatan koperasi kredit, hasil diatas dibagi dengan jumlah komponen.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rasio}}{\text{Jumlah Komponen}}$$

Tabel 23 Rasio Rata-Rata Menurut Kriteria Inkopdit Tahun 2002 - 2004

Tahun	Jumlah Rasio	Jumlah Komponen	Nilai
2002	787,29%	11	71,57%
2003	655,78%	11	59,61%
2004	684,93%	11	62,26%

Data yang telah diolah

Nilai dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Koperasi kredit Bina Warga menurut kriteria Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) berada pada kondisi **cukup sehat**, karena pada interval antara 51% sampai dengan 75%. Maka dapat dikatakan juga kinerja keuangan Koperasi kredit Bina Warga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini adalah **cukup sehat**.

C. Penilaian Kesehatan Koperasi kredit Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 194/KEP/M/IX/1998

1. Permodalan

Perhitungan permodalan dilakukan dengan cara menghitung rasio per komponen. Adapun perhitungannya meliputi dua cara, yaitu:

a). Rasio modal sendiri terhadap total asset.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dengan mendukung pendanaan terhadap total aktiva.

$$\text{Permodalan (a)} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 24 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset Menurut Kriteria SK

Menkop no. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Modal Sendiri	Total Aktiva	Rasio
2002	Rp. 475.245.610,00	Rp. 705.201.213,00	67,39%
2003	Rp. 664.738.734,00	Rp. 1.101.092.161,00	60,37%
2004	Rp. 889.719.921,00	Rp. 1.769.335.204,00	50,28%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio permodalan yang lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) diberi nilai 0 (nol) dan untuk tiap kenaikan rasio modal 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 5 (lima) dengan maksimum nilai 100%. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% dan diperoleh skor permodalan.

Maka nilai kredit rasio permodalan dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: $67,39\% \times 5 = 336,95\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 10\% = 10$

Tahun 2003: $60,37\% \times 5 = 301,85\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 10\% = 10$

Tahun 2004: $50,28\% \times 5 = 251,4\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 10\% = 10$

Hasil data rasio selama tahun 2002 hingga 2004 Koperasi Kredit Bina Warga menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 total asset didukung oleh dana modal sendiri.

b). Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung agunan.

$$\text{Permodalan (b)} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

Tabel 25 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Menurut Kriteria SK Menkop No.194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Modal Sendiri	Pinjaman Diberikan yang Berisiko	Rasio
2002	Rp. 475.245.610,00	Rp. 642.565.000,00	73,96%
2003	Rp. 664.738.734,00	Rp. 974.535.000,00	68,21%
2004	Rp. 889.719.921,00	Rp. 1.365.687.000,00	65,14%

Data yang telah diolah

Semua pinjaman yang diberikan koperasi berisiko, berbeda dengan bank. Bank setiap pinjaman dengan agunan 30% dari jumlah pinjaman, tetapi didalam koperasi agunan yang digunakan adalah dua kali jumlah tabungan, ada juga tiga sampai lima kali jumlah tabungan tergantung ketentuan setiap koperasi.

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), nilai kredit diberi nilai 0 (nol). Untuk setiap kenaikan rasio modal 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan nilai maksimum 100%. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% dan diperoleh skor permodalan.

Maka nilai kredit rasio permodalan dari tahun 2002-2004 adalah:

$$\text{Tahun 2002: } 73,96\% \times 1 = 73,96 \times 10\% = 7,39$$

Tahun 2003: $68,21\% \times 1 = 68,21 \times 10\% = 6,82$

Tahun 2004: $65,14\% \times 1 = 65,14 \times 10\% = 6,51$

Perkembangan Koperasi Kredit Bina Warga menunjukkan kondisi yang baik, karena modal sendiri mampu menutupi kerugian yang terjadi.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif merupakan harta bagi koperasi yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

- a). Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan. Rasio ini untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh pinjaman yang diberikan.

$$\text{Kualitas Aktiva Produktif (a)} = \frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Total Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 26 Rasio Antara Volume Pinjaman Kepada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan Menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Volume Pinjaman pada Anggota	Total Volume Pinjaman yang Diberikan	Rasio
2002	Rp. 642.565.000,00	Rp. 715.010.000,00	89,86%
2003	Rp. 974.535.000,00	Rp. 996.275.000,00	97,98%
2004	Rp. 1.365.687.000,00	Rp. 1.365.760.000,00	99,99%

Data yang telah diolah

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa koperasi Kredit Bina Warga mempunyai perkembangan yang baik. Dikatakan baik karena koperasi mampu memberikan pinjaman pada anggota hampir dengan seluruh

pinjaman yang diberikan. Dari tahun 2002 hingga 2004 ada peningkatan-peningkatan rasio. Keberadaan pinjaman yang diberikan kepada anggota sangat penting karena merupakan kekayaan yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi.

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio kualitas aktiva produktif sama dengan atau lebih besar dari 60% diberikan nilai kredit 100, sedangkan untuk rasio lebih kecil dari 60% diberikan nilai kredit 0 (nol), artinya koperasi dinilai lebih baik apabila pinjaman diberikan kepada anggota minimal 60% dari volume pinjaman yang diberikan. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% dan diperoleh skor kualitas aktiva produktif. Maka nilai kredit rasio kualitas aktiva produktif dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: 89,86% (nilai 100 karena lebih dari 60%) x 10% = 10

Tahun 2003: 97,98% (nilai 100 karena lebih dari 60%) x 10% = 10

Tahun 2004: 99,99% (nilai 100 karena lebih dari 60%) x 10% = 10

- b). Rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur besarnya resiko pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan.

$$\text{Kualitas Aktiva Produktif (b)} = \frac{\text{Resiko Pinjaman Bermasalah}}{\text{Total Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 27 Rasio Antara Risiko Pinjaman Bermasalah Dengan Pinjaman yang Diberikan Menurut Kriteria SK Menkop NO. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Risiko Pinjaman Bermasalah	Total Volume Pinjaman yang Diberikan	Rasio
2002	Rp. 27.240.406,75	Rp. 715.010.000,00	3,80%
2003	Rp. 97.255.993,50	Rp. 996.275.000,00	9,76%
2004	Rp. 123.277.899,75	Rp. 1.365.760.000,00	9,02%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio 50% atau lebih besar diberi nilai kredit 0 (nol). Untuk penurunan rasio 1%, nilai kreditnya ditambah 2 dengan maksimum nilai kredit 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% dan diperoleh skor kualitas aktiva produktif. Maka nilai kredit rasio kualitas aktiva produktif dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: $3,80\% \times 2 = 7,60\% \times 10\% = 0,76$

Tahun 2003: $9,76\% \times 2 = 19,52\% \times 10\% = 1,95$

Tahun 2004: $9,02\% \times 2 = 18,04\% \times 10\% = 1,80$

Hasil tersebut dinilai kecil dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada anggota koperasi, koperasi diharapkan dapat menekan pinjaman yang bermasalah sehingga usaha koperasi untuk mendistribusikan pinjaman pun dapat menjadi lancar.

c). Rasio antara cadangan resiko dengan resiko pinjaman bermasalah.

Rasio ini bertujuan mengukur besarnya cadangan resiko dibandingkan dengan resiko pinjaman bermasalah.

Cadangan Resiko

Kualitas Aktiva Produktif (c) $\frac{\text{Resiko Pinjaman Bermasalah}}{\text{Resiko Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$

Tabel 28 Rasio Antara Cadangan Berisiko dengan Resiko Pinjaman Bermasalah Menurut Kriteria SK Menkop NO. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Cadangan Risiko	Risiko Pinjaman Bermasalah	Rasio
2002	Rp. 22.951.426,00	Rp. 27.240.406,75	84,25%
2003	Rp. 36.409.435,00	Rp. 97.255.993,50	37,43%
2004	Rp. 54.726.585,00	Rp. 123.277.899,75	44,39%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio 0% (tidak mempunyai cadangan resiko) diberi nilai 0 (nol). Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, maka nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% dan diperoleh skor kualitas aktiva produktif. Maka nilai kredit rasio kualitas aktiva produktif dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: $84,25\% \times 1 = 84,25\% \times 10\% = 8,42$

Tahun 2003: $37,42\% \times 1 = 37,43\% \times 10\% = 3,74$

Tahun 2004: $44,39\% \times 1 = 44,39\% \times 10\% = 4,43$

Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah di atas memberikan gambaran bahwa Koperasi Kredit Bina Warga tidak dapat menutup pinjaman yang bermasalah dengan dana cadangannya, sekalipun pinjaman tersebut macet. Sebaiknya Kopdit Bina Warga harus menekan angka pinjaman yang bermasalah tersebut agar tidak mengganggu operasional koperasi.

3. Manajemen

Penilaian terhadap manajemen, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek tersebut adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, pengelolaan, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengurus mengenai kelima aspek tersebut, sehingga terdapat 25 pertanyaan.

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

- Dasar-dasar jawaban atas 25 pertanyaan adalah positif jika ada dan negatif jika tidak ada.
- Setiap pertanyaan yang jawabannya ada akan diberi nilai kredit 4.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 25% maka akan diperoleh skor manajemen.

Tabel 29 Rasio Manajemen Menurut Kriteria SK Menkop
No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	2002		2003		2004	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1. Permodalan	5	-	5	-	5	-
2. Aktiva	4	1	4	1	4	1
3. Pengelolaan	5	-	5	-	5	-
4. Rentabilitas	5	-	5	-	5	-
5. Likuiditas	3	2	3	2	3	2
	22	3	22	3	22	3

Data yang telah diolah

Maka nilai kredit rasio manajemen dari tahun 2002-2004 adalah:

$(X \times 4) \times 25\%$ (Bobot Penilaian)

Tahun 2002: $(22 \times 4) \times 25\% = 88 \times 25\% = 22$

Tahun 2003: $(22 \times 4) \times 25\% = 88 \times 25\% = 22$

Tahun 2004: $(22 \times 4) \times 25\% = 88 \times 25\% = 22$

Manajemen Koperasi kredit Bina Warga dapat dikatakan baik, karena dari 25 pertanyaan yang diajukan kepada pengurus Koperasi kredit Bina Warga tentang kesehatan manajemen, koperasi tersebut telah memiliki 22 kriteria dari 25 pertanyaan.

Kriteria yang belum ada pada Koperasi Kredit Bina Warga mengenai aspek likuiditas yaitu: Pertama, koperasi belum memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. Kedua, koperasi tidak memiliki fasilitas pinjaman dari lembaga lembaga lain, sebab koperasi telah mendapat fasilitas pinjaman dari BK₃D Surakarta. Kriteria tersebut akan mempengaruhi penyediaan dana likuid.

4. Rentabilitas

a). Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh sisa hasil usaha dari pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemampuan koperasi memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan operasionalnya.

$$\text{Rentabilitas (a)} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 30 Rasio Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Pendapatan Oprasional	Rasio
2002	Rp. 134.580.090,00	Rp. 206.186.875,00	65,27%
2003	Rp. 183.171.505,00	Rp. 264.122.230,00	69,35%
2004	Rp. 234.611.074,00	Rp. 425.424.285,00	55,14%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio 0 (nol) atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol). Untuk setiap kenaikan rasio SHU 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum nilai kredit 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% dan diperoleh skor kualitas aktiva produktif. Maka nilai kredit rasio rentabilitas dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: $65,27\% \times 20 = 1305,4\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Tahun 2003: $69,35\% \times 20 = 1387\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Tahun 2004: $55,14\% \times 20 = 1102,8\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

b). Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset.

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh sisa hasil usaha dibandingkan dengan total aktiva yang ada pada koperasi.

$$\text{Rentabilitas (b)} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 31 Rasio Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak Terhadap Total Asset Menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Total Aktiva	Rasio
2002	Rp. 134.580.090,00	Rp. 705.201.213,00	19,08%
2003	Rp. 183.171.505,00	Rp. 1.101.092.161,00	16,63%
2004	Rp. 234.611.074,00	Rp. 1.769.335.204,00	13,25%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio 0 (nol) atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol). Untuk setiap kenaikan rasio SHU 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambahkan 10 dengan maksimum nilai kredit 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% dan diperoleh skor kualitas aktiva produktif. Maka nilai kredit rasio rentabilitas dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: $19,08\% \times 10 = 190,8\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Tahun 2003: $16,63\% \times 10 = 166,3\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Tahun 2004: $13,25\% \times 10 = 132,5\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

c). Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Rasio ini bertujuan untuk mengukur besarnya beban operasional koperasi dibandingkan dengan pendapatan operasional.

$$\text{Rentabilitas (c)} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 32 Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional menurut Kriteria SK Menkop NO. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	Rasio
2002	Rp. 71.604.785,00	Rp. 206.186.875,00	34,72%
2003	Rp. 80.950.725,00	Rp. 264.122.230,00	30,64%
2004	Rp. 190.813.211,00	Rp. 425.424.285,00	44,85%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol). Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1% mulai 100%, nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% dan diperoleh skor rentabilitas. Maka nilai kredit rasio rentabilitas dari tahun 2002-2004 adalah:

Tahun 2002: $34,72\% \times 10 = 347,2\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Tahun 2003: $30,64\% \times 10 = 306,4\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Tahun 2004: $44,85\% \times 10 = 448,5\%$ (namun nilai maksimum 100 maka nilai kredit 100%) $\times 5\% = 5$

Rasio rentabilitas Koperasi kredit Bina Warga cukup mengembirakan, karena rata-rata dari rasio tersebut dapat mendatangkan laba, sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang nanti akan dibagikan kemungkinan lebih banyak.

5. Likuiditas

Likuiditas koperasi adalah kemampuan koperasi untuk melunasi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan pada rasio antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total Volume Pinjaman Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Tabel 33 Rasio Likuiditas menurut Kriteria SK Menkop No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002-2004

Keterangan / Tahun	Total Volume Pinjaman Diberikan	Dana yang Diterima	Rasio
2002	Rp. 715.010.000,00	Rp 1.060.131.213,00	67,44%
2003	Rp. 996.275.000,00	Rp. 1.609.453.161,00	61,90%
2004	Rp. 1.365.760.000,00	Rp. 2.700.617.204,00	50,57%

Data yang telah diolah

Cara memperoleh angka skor tersebut antara lain:

Untuk rasio 90% atau lebih diberi nilai 0 (nol), untuk rasio dibawah 90% atau lebih kecil diberi nilai kredit 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% dan diperoleh skor likuiditas. Maka nilai kredit rasio likuiditas dari tahun 2002-2004 adalah:

Nilai (lebih besar dari 90% = 0 (nol), kurang dari 90% = 100) x 10%

Dari tahun 2002-2004 rasio likuiditas lebih besar dari 90% sehingga nilai dari rasio ini adalah 0 (nol), maka skor likuiditas adalah 0 (nol).

Skor: 67,44% (*kurang dari 90% = 100*) x 10% = 10

61,90% (*kurang dari 90% = 100*) x 10% = 10

50,57% (*kurang dari 90% = 100*) x 10% = 10

Hasil diatas menunjukkan bahwa Koperasi kredit Bina Warga mampu menyediakan dana yang likuid jika sewaktu-waktu anggota membutuhkan.

Tabel 34 Nilai Predikat Kesehatan Koperasi Menurut Keputusan Menteri Koperasi No 194/KEP/M/IX/1998

<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
81%-100%	SEHAT
67%-80%	CUKUP SEHAT
52%-66%	KURANG SEHAT
0%-51%	TIDAK SEHAT

Perhitungan dari rasio-rasio diatas, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 35 Jumlah Skor Penilaian Kesehatan Tahun 2002-2004

No	Aspek yang dinilai	Tahun		
		2002	2003	2004
1	Permodalan	17,39	16,82	16,51
2	Kualitas Aktiva Produktif	19,18	15,69	16,23
3	Manajemen	22	22	22
4	Rentabilitas	15	15	15
5	Likuiditas	10	10	10
Jumlah		83,57	79,51	79,74

Data yang telah diolah

Hasil perhitungan dari tabel diatas menurut kriteria surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah Indonesia No.194/KEP/M/X/1998 pada tahun 2002 kinerja keuangannya menunjukkan

kondisi yang **sehat**, karena berada pada interval antara 81%-100%. Sedangkan di tahun 2003 hingga 2004 Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta Kinerja keuangannya menunjukkan kondisi yang **cukup sehat**, berada pada interval 67%-80%.

D. Perbandingan Antara Kriteria Kinerja Keuangan Menurut Induk Koperasi Kredit Indonesia dengan Kriteria Kinerja Keuangan Menurut Keputusan Menteri Koperasi

Perbandingan kinerja keuangan menurut Keputusan Menteri Koperasi dengan kriteria kinerja keuangan menurut Inkopdit, apabila penilaian kesehatan koperasi dinilai kurang sehat ataupun tidak sehat maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan koperasi tersebut juga tidak baik atau kurang baik, demikian juga sebaliknya apabila penilaian kesehatan koperasi dinilai cukup sehat atau sehat maka dapat dikatakan juga bahwa kinerja keuangan koperasi tersebut sehat ataupun cukup sehat.

Perbandingan antara Keputusan Menteri Koperasi dengan kriteria kinerja keuangan menurut Inkopdit dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 36 Perbandingan Kriteria Inkopdit dan Kriteria KEPMENKOP No. 194/KEP/M/IX/1998 Tahun 2002 - 2004

No	Kriteria Menurut	Tahun		
		2002	2003	2004
1	Inkopdit Indonesia	71,57% (Cukup Sehat)	59,61% (Cukup Sehat)	62,26% (Cukup Sehat)
2	Kep. Men. No. 194/KEP/M/IX/1998	83,57% (Sehat)	79,51% (Cukup Sehat)	79,74% (Cukup Sehat)

Perbandingan di atas telah menunjukkan bahwa Koperasi Kredit Bina Warga Surakarta, baik menurut kriteria dari Inkopdit maupun dari Menteri Koperasi, menghasilkan analisa yang hampir sama dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang telah dikumpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pengurus yang disajikan kepada anggota koperasi dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). Laporan keuangan pengurus terdiri dari neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kesehatan koperasi atau kinerja keuangan suatu koperasi.
2. Hasil penilaian kesehatan atau kinerja keuangan Koperasi Kredit Bina Warga, baik menurut Inkopdit ataupun menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah No. 194/KEP/M/IX/1998 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2002

Hasil perhitungan menurut kriteria Inkopdit adalah 71,57%, dari hasil tersebut terlihat bahwa Koperasi kredit Bina Warga sehat. Menurut kriteria Kepmen No.194/KEP/M/IX/1998 adalah 83,57% ini berarti Koperasi Kredit Bina Warga dapat dikatakan cukup sehat.

b. Tahun 2003

Pada tahun ini juga dapat dikatakan bahwa Koperasi kredit Bina Warga pada posisi cukup sehat menurut kedua kriteria yang dianalisis. Posisi Koperasi kredit Bina Warga menurut kriteria Inkopdit berada pada posisi 59,61% dan pada posisi 79,51% menurut kriteria Kepmen No. 194/KEP/M/IX/1998.

c. Tahun 2004

Pada tahun 2004 Koperasi Kredit berada pada kondisi yang cukup sehat, karena pada tahun ini hasil rasio perhitungan penilaian kesehatan koperasi kredit menurut kriteria Inkopdit, Koperasi kredit Bina Warga berada pada posisi 62,26% dan pada posisi 79,74% menurut rasio perhitungan dari penilaian kesehatan koperasi kredit menurut kriteria Kepmen No. 194/KEP/M/IX/1998.

B. Saran

Setelah penulis mengevaluasi hasil penelitian mengenai laporan keuangan, dalam menilai kesehatan kinerja keuangan Koperasi Kredit Bina Warga di Surakarta, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Analisis kesehatan koperasi menurut Inkopdit memberikan suatu kesimpulan bahwa Kopdit Bina Warga dikatakan dalam kondisi yang cukup sehat, tetapi walaupun demikian masih banyak kekurangan, yaitu dalam penyediaan modal produktif yang mengakibatkan kesulitan bagi koperasi dalam memberikan pinjaman bagi anggota. Sebaiknya Koperasi

Kredit Bina Warga masih harus meningkatkan modal produktifnya dengan jalan mencari pinjaman kepada Silang Pinjam Daerah (SPD) seperti BK3D atau dengan cara memupuk modal dari anggota maupun bukan anggota, seperti meningkatkan tabungan sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka), dan memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk menabung di koperasi, menghimpun pengusaha-pengusaha kecil menengah atau pedagang-pedagang kaki lima untuk menabung, selain itu dari pihak koperasi juga harus memperhatikan timbal baliknya yaitu memberikan bunga yang menarik, memberikan hadiah dan memberikan pelayanan yang baik.

2. Tingkat kelalaian pinjaman yang cukup tinggi dapat mengakibatkan terhambatnya perputaran modal. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan. Sebaiknya koperasi dapat menekan kelalaian pinjaman dengan cara lebih selektif dalam pencairan dana pinjaman, lebih menitik beratkan kepada peminjam yang meminjam untuk produktif dan bukan yang konsumtif, dan untuk peminjam yang macet sebaiknya koperasi membentuk suatu badan atau menunjuk karyawan untuk menagih secara reguler. Selain itu sebaiknya pinjaman dalam jumlah yang besar agar menggunakan agunan dan jasa notaris untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Koperasi Kredit Bina Warga sebaiknya memiliki dana resiko kredit yang lebih besar dari jumlah pinjaman yang bermasalah, hal ini untuk mengantisipasi apabila ada pinjaman yang bermasalah atau bahkan macet.

Koperasi kredit Bina Warga sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.

4. Manajemen Koperasi Kredit Bina Warga dapat dikatakan rata-rata baik, tetapi dalam penilaian terhadap likuiditas terdapat beberapa hal yang belum dimiliki koperasi, maka diharapkan Koperasi Kredit Bina Warga memiliki kebijaksanaan mengenai pengendalian likuiditasnya dan memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.
5. Koperasi Kredit Bina Warga perlu adanya pimpinan seorang manager yang eksklusif dan betul-betul profesional untuk mengambil kebijaksanaan mengenai kelangsungan usaha koperasi kredit Bina Warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK₃I). *Koperasi Kredit*. Surakarta: Digandakan oleh Badan koordinasi koperasi kredit Daerah (BK₃D).
- Baridwan, Zaki. (1996). *Intermediate Accounting*. Edisi 6. Yogyakarta: BPFE.
- BK₃I. *Manajemen Pengawasan Koperasi Kredit*. Jakarta: BK₃I.
- Credit Union National Association (2004). www.creditunion.inc.
- Departemen Koperasi. (1996). *Keputusan Menteri Dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI, Nomor 194/Kep/M/IX/1998, Tentang Petunjuk pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*. Jateng: Diperbanyak oleh Gabungan Koperasi Pegawai RI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (1998). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Justiani. (2006). *Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas Untuk Mengukur Kinerja Koperasi*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. (Tidak Diterbitkan).
- Lidyani, Elaviana. (2004). *Evaluasi Kinerja Credit Union Dengan Menggunakan Sistim Pearls*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. (Tidak Diterbitkan).
- Munawir, Slamet. (2001). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Richadson, D. (2003). *“PEARLS” Monotoring Sistim Of Credit Union*. USA: World Concil Of CU. WWW.Woccu.Org.

- Situmorang, Erita Marsaulina. (2001). *Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sesuai Dengan SK Menkop, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 194/KEP/M/IX/1998*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. (Tidak Diterbitkan).
- Swasono, Sri-Edi. (1995). *Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Pres.
- Tugiman, Hiro. (1996). *Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tunggal, Amin Widjaja. (1995). *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang RI No. 12 Th.1967 Tentang *Pokok-pokok Koperasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi
- Undang-undang RI No. 25 Th.1992 Tentang *Perkoperasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi
- Widayanto, Gatot. (1993). *Suatu Terobosan Baru Dalam Mengukur Kinerja Perusahaan, Usahawan*. EVA/NITAMI Hal 19.
- Wirasmita, Rivai dan Ani Kenangasari. (1999). *Analisis Laporan Keuangan Koperasi*. Bandung: Pionir Jaya.

Lampiran I**DATA STATISTIK KOPERASI KREDIT BINA WARGA
PER 31 DESEMBER 2002**

Tanggal pembentukan	: 23 Maret 1973	Pendidikan bulan ini	: - kali
Lingkungan kerja	: Masyarakat	Pemeriksaan bulan ini	: - kali
Jumlah anggota s/d bulan ini	: 444 orang, Pria 220 orang, Wanita 224 orang		
Jumlah seluruh simpanan	: SP.SW.SS	= Rp	295.839.700
Jumlah kelalaian piutang	: 14 orang, jumlah uang	= Rp	23.329.000
Pinjaman dalam bulan ini	: 41 orang, jumlah uang	= Rp	113.110.000
Peminjaman dalam tahun ini	: 401 orang, jumlah uang	= Rp	715.010.000
Peminjaman sejak pembentukan	: orang, jumlah uang	= Rp	

Sumber Data : Materi RAT 2002

**DATA STATISTIK KOPERASI KREDIT BINA WARGA
PER 31 DESEMBER 2003**

Tanggal pembentukan	: 23 Maret 1973	Pendidikan bulan ini	: 2 kali
Lingkungan kerja	: Masyarakat	Pemeriksaan bulan ini	: 1 kali
Jumlah anggota s/d bulan ini	: 517 orang, Pria 259 orang, Wanita 258 orang		
Jumlah seluruh simpanan	: SP.SW.SS	= Rp	415.985.842
Jumlah kelalaian piutang	: orang, jumlah uang	= Rp	90.405.000
Pinjaman dalam bulan ini	: 81 orang, jumlah uang	= Rp	265.925.000
Peminjaman dalam tahun ini	: 485 orang, jumlah uang	= Rp	996.275.000
Peminjaman sejak pembentukan	: 2503 orang, jumlah uang	= Rp	4.096.929.000

Sumber Data : Materi RAT 2003

**DATA STATISTIK KOPERASI KREDIT BINA WARGA
PER 31 DESEMBER 2004**

Tanggal pembentukan	: 23 Maret 1973	Pendidikan bulan ini	: - kali
Lingkungan kerja	: Masyarakat	Pemeriksaan bulan ini	: 1 kali
Jumlah anggota s/d bulan ini	: 667 orang, Pria 314 orang, Wanita 353 orang		
Jumlah seluruh simpanan	: SP.SW.SS	= Rp	573.614.555
Jumlah kelalaian piutang	: 89 orang, jumlah uang	= Rp	115.275.000
Pinjaman dalam bulan ini	: 206 orang, jumlah uang	= Rp	264.760.000
Peminjaman dalam tahun ini	: 942 orang, jumlah uang	= Rp	1.365.760.000
Peminjaman sejak pembentukan	: 5.825 orang, jumlah uang	= Rp	9.284.489.000

Sumber Data : Materi RAT 2004

Lampiran II

DATA TAMBAHAN KOPERASI KREDIT BINA WARGA

PINJAMAN	TAHUN			
	2001	2002	2003	2004
Total Angsuran	Rp 379.355.000,00	Rp 533.566.000,00	Rp 664.305.000,00	Rp 974.608.000,00
Pencairan Pinjaman	Rp 520.690.000,00	Rp 715.010.000,00	Rp 996.275.000,00	Rp 1.365.760.000,00
Sisa Pinjaman	Rp 461.121.000,00	Rp 642.565.000,00	Rp 974.535.000,00	Rp 1.365.687.000,00

Sumber Data: Materi RAT 2001-2004

KEMACETAN PINJAMAN	TAHUN		
	2002	2003	2004
Nominal	Rp 23.329.000,00	Rp 90.405.000,00	Rp 115.275.000,00

Sumber Data: Materi RAT 2002-2004

PENCAIRAN PINJAMAN	TAHUN		
	2002	2003	2004
Nominal	Rp 715.010.000,00	Rp 996.275.000,00	Rp 1.365.760.000,00

Sumber Data: Materi RAT 2002-2004

RISIKO PINJAMAN BERMASALAH	TAHUN		
	2002	2003	2004
Nominal	Rp. 27.240.406,75	Rp. 97.255.993,50	Rp. 123.277.899,75

Sumber Data: Pengurus Koperasi Kredit Bina Warga

DANA DITERIMA	TAHUN		
	2002	2003	2004
Nominal	Rp 1.079.672.123,00	Rp 1.557.020.656,00	Rp 2.466.006.130,00

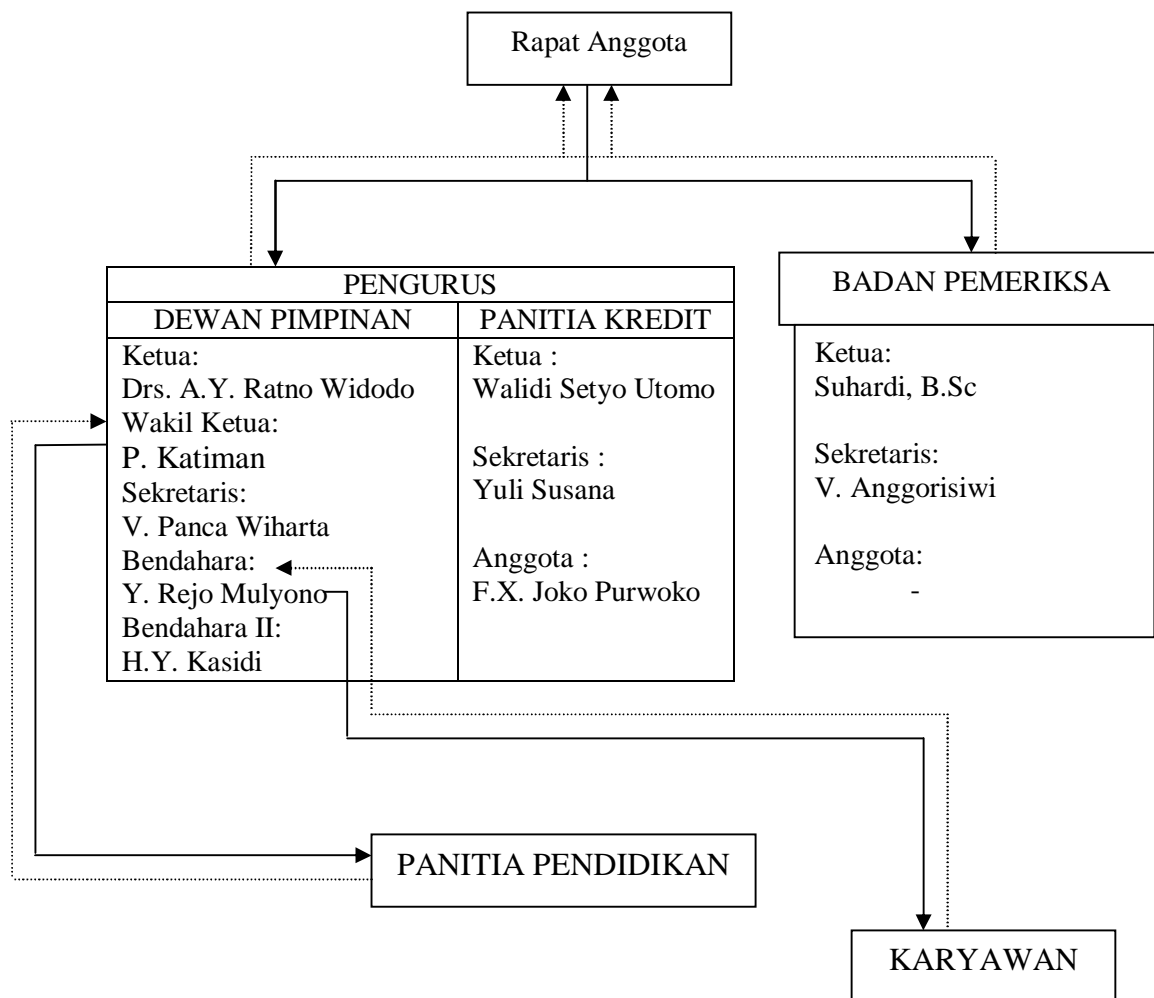
Sumber Data: Materi RAT 2002-2004

DANA DITERIMA	TAHUN	
	2001	
Saham	Rp	225.645.008,00
Dana Cadangan	Rp	33.647.206,00
Modal	Rp	259.292.214,00

Sumber Data: Materi RAT 2001

Lampiran III

STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI KREDIT BINA WARGA



Keterangan : _____ = garis komando (perintah)

..... = garis tanggung jawab

Lampiran IV

PEDOMAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

A. Sejarah Singkat Koperasi

1. Apa nama koperasi ?
2. Tanggal berapa koperasi berdiri ?
3. Kapan, dimana dan siapa yang mendirikan koperasi ?
4. Apakah koperasi ini berbadan hukum ?
5. Apakah ada akte notaris yang mendukung dari pendirian koperasi ?
6. Apakah akte notaris tersebut merupakan keputusan menteri ?
7. Dimanakah alamat lengkap koperasi ?
8. Mengapa memilih lokasi ini ?
9. Apakah tujuan dari pendirian koperasi ?

B. Struktur Organisasi

10. Bagaimana dengan struktur organisasinya ?
11. Apakah tugas dari masing-masing jabatan ?

C. Permodalan

12. Dari mana saja sumber permodalan diperoleh ?
13. Bagaimana dengan susunan permodalannya ?

Lampiran V

**KUISIONER ASPEK MANAJEMEN
MENURUT KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
NO.194/KEP/M/IX/1998**

No	Pertanyaan	Tahun					
		2002		2003		2004	
		P	N	P	N	P	N
A.	Permodalan						
1.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.	P		P		P	
2.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya.	P		P		P	
3.	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.	P		P		P	
4.	Simpanan (Tabungan Koperasi dan Simpanan berjangka Koperasi) meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya.	P		P		P	
5.	Investasi harta tetap dari investaris serta biaya ekspansi perkantoran dibiaya dengan modal sendiri.	P		P		P	
B.	Kualitas Aktiva Produktif						
1.	Pinjaman lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan.	P		P		P	
2.	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang dinilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan.		N		N		N
3.	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari pinjaman macet.	P		P		P	
4.	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditarik sekurang-kurangnya sepersepuluh.	P		P		P	
5.	Koperasi senantiasa memantau agar produsen pinjaman dilaksanakan dengan baik.	P		P		P	

C.	Pengelolaan					
1.	Memiliki rencana kerja jangka pendek (tahunan) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman, - Pendanaan, - Pendapatan dan biaya, - Personil. 	P		P		P
2.	Memiliki bagan organisasi yang memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan disiplin kerja.	P		P		P
3.	Mempunyai sistem dan prosedur tertulis mengenai pengendalian intern tentang pengamanan asset koperasi yang mencakup kas, harta tetap dan likuid lainnya.	P		P		P
4.	Memiliki program pendidikan dan latihan bagi pegawai dan anggota.	P		P		P
5.	Memiliki kebijaksanaan tertulis yang mengatur bahwa pengurus dan pegawai tidak diperbolehkan memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.	P		P		P
D.	Rentabilitas					
1.	Memiliki ketentuan tentang penyesihan penghapusan piutang/cadangan resiko untuk menutup kerugian yang diperkirakan karena macet.	P		P		P
2.	Memiliki ketentuan bahwa semua pengeluaran/biaya harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.	P		P		P
3.	Memiliki ketentuan mengenai pembatasan pemberian pinjaman kepada anggota baru.	P		P		P
4.	Dalam pemberian pinjaman, koperasi lebih menitik beratkan atas kemampuan peminjam untuk mengembalikannya dari pada tersedianya agunan.	P		P		P

E.	Likuiditas					
1.	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.		N		N	N
2.	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.	P		P		P
3.	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban jatuh tempo.		N		N	N
4.	Memiliki ketentuan yang mengatur hubungan antara jumlah pemberian pinjaman dengan jumlah dana yang ada.	P		P		P
5.	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.	P		P		P

Keterangan : P = Positif
N = Negatif